

# **SKRIPSI**

**ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH (DPRD) KABUPATEN NATUNA TERHADAP PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
ANGGARAN TAHUN 2010**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana  
Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**



**OLEH**

**SOLIHIN**

**NIM. 10775000381**

**PROGRAM S.1**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2012**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN NATUNA TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) ANGGARAN TAHUN 2010**

**Oleh : Solihin**

*Pengawasan adalah upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya di kemudian hari, fungsi pengawasan anggaran adalah untuk mencegah sekecil dan sedini mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas. Persoalannya tanpa pengawasan, proses pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas bisa saja menyimpang atau bertentangan dari prosedur dan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna(DPRD). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah fungsi pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Natuna, upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan APBD serta hambatan-hambatan yang terjadi didalam melaksanakan pengawasan APBD di Kabupaten Natuna. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni dengan mengumpulkan fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian berlangsung untuk kemudian diproses dan dianalisis lebih lanjut berdasarkan teori yang ada. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Natuna, Komisi I DPRD Kabupaten Natuna, Panitia anggaran, Kepala bagian naskah dan dokumentasi DPRD Kabupaten Natuna, Kepala Instansi Pemerintahan Kabupaten Natuna, Beberapa tokoh masyarakat, Beberapa Tokoh Pemuda, sebanyak 61 orang dari keseluruhan sampel tersebut yang diambil sebagai responden sebanyak 52 orang hal ini dikarenakan penulismenentukan sampel menggunakan tehnik purposive sampling yaitu orang-orang yang dianggap paham dan tau terhadap penelitian yang diinginkan penulis Dari hasil penelitan lapangan dan pembahasan melalui penyebaran questioner, observasi, serta wawancara terhadap responden maka secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Natuna Kurang Baik, hal ini dapat diketahui dari keseluruhan jawaban responden yang berkaitan dengan variabel penelitian.*

**Kata kunci:** *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),  
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).*

## **KATA PENGANTAR**

Tiada kata yang paling pantas penulis ucapkan kecuali Alhamdulillah Wasyukurillah puji syukur kehadiran Allah AWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayah serta petunjuk dariNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN NATUNA TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) ANGGARAN TAHUN 2010”

Syalawat dan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat islam. Semoga dengan senan tiasa kita mengucapkan syalawat dan salam kepada Rasulullah SAW mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang ahli surga AMIN...

Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec beserta Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang turut membantu kelancaran segala urusan perkuliahan.

2. Bapak Drs. Almasri, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Drs. Almasri, M.Si dan Bapak Rusdi, S. Sos, MA sebagai Dosen Pembimbing penulis yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini mulai dari awal hingga skripsi ini selesai.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial , yang telah memberikan berbagai macam ilmu selama penulis melakukan perkuliahan.
5. Bapak Hadi Candra, S. Sos sebagai Ketua DPRD Kabupaten Natuna serta Kepala Bagian Naskah dan Dokumentasi DPRD Kabupaten Natuna yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk memperoleh data selama penelitian berlangsung.
6. Buat kedua orang tua penulis Ibunda Zaleha dan Ayahanda Yakub Abdullah (Alm) yang paling tercinta dan ketiga kakak tercinta Bahliarwati, Siti Baheram dan Sulaiman, yang selalu memberikan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis yang senantiasa mendoakan penulis dan semangat tiada habis-habisnya, sehingga skripsi ini dapat penulis persembahkan untuk kedua orang tua dan saudara penulis.
7. Buat teman penulis Zuldi, S. Sos, M. Si, Akmaludin, S. Pdi, Irwan, seorang sahabat Azis Muarif serta teman-teman Asrama Natuna Pekanbaru yang

sangat banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini sampai dengan selesai.

8. Buat teman-teman satu jurusan senasib sepenanggungan yang selama ini tempat berbagi cerita penulis dari awal kuliah hingga selesai.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi yang telah disusun ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun dari konsep penyusunan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki penulis.

Oleh karena itu, penulis menerima dengan terbuka berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga bantuan, motivasi dan doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapatkan ridho dari ALLAH SWT. semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembacanya.

Pekanbaru, 07 Mei 2012

Penulis

**Solihin**  
**10775000381**

## **DAFTAR ISI**

**PERSETUJUAN**

**PENGESAHAN**

**PENGHARGAAN**

**ABSTRAK**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

### **BAB I PENDAHULUAN**

I.1 Latar Belakang Masalah .....	1
I.2 Perumusan Masalah.....	11
I.3 Tujuan Penelitian.....	12
I.4 Manfaat Penelitian.....	12
I.5 Sistematika Pembahasan .....	13

### **BAB II TELAAH PUSTAKA**

II.1 Pengertian Pengawasan.....	15
II.2 Jenis-Jenis dan Tipe-Tipe Pengawasan.....	16
II.3 Pengawasan Anggaran .....	20
II.4 Pengawasan Keuangan Daerah Oleh DPRD.....	21
II.5 Otonomi Daerah .....	23
II.6 DPRD .....	25
II.7 Konsep Anggaran Sektor Publik.....	28
II.8 Pandangan Islam Tentang Pemimpin.....	34
II.9 Indikator Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap APBD .....	35
II.10 Defenisi Konsep .....	37
II.11 Konsep Operasional .....	38
II.12 Kerangka Teori .....	40
II.13 Hipotesis.....	40

### **BAB III METODE PENELITIAN**

III.1 Jenis Penelitian .....	41
III.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	41
III.3 Populasi dan Sampel.....	42
III.4 Jenis dan Sumber Data .....	44
III.5 Teknik Pengumpulan Data .....	44
III.6 Analisis Data.....	44

### **BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

IV.1 Gambaran Umum Kabupaten Natuna .....	47
IV.2 Profil DPRD Kabupaten Natuna .....	56
IV.3 Identitas Anggota DPRD KaB. Natuna Periode 2009-2014 .....	69

### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

V. Identitas Responden .....	71
V.1.1 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	71
V.1.2. Responden Berdasarkan Tingkat Umur .....	72
V.2 Analisis Fungsi Pengawasan.....	73
V.2.1 Fungsi Perencanaan Pengawasan APBD Kab. Natuna .....	77
V.2.2 Tahapan Pelaksanaan pengawasan APBD Kab. Natuna ...	86
V.2.3 Tahap Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah.....	90
V.3 Faktor penghambat .....	91
V. 4 Upaya-upaya DPRD untuk meningkatkan fungsi pengawasan ..	94
V.5 Faktor penghambat .....	101

### **BAB VI PENUTUP**

VI. 1 Kesimpulan .....	107
VI. 2 Saran .....	108

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

No Table	JUDUL TABEL	Hal.
III.1	Jumlah Informan Dalam Penelitian.....	43
IV.2	Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Natuna .....	62
IV.3	Komposisi Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Natuna Masa Jabatan 2009-2014 .....	64
IV.4.	Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Natuna Masa Jabatan 2009-2014.....	66
IV IV.	Komposisi Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislatif DPRD Kabupaten Natuna .....	67
IV.6.	Komposisi Fraksi-Fraksi Dalam Kelembagaan DPRD Kabupaten Natuna Periode 2009-2014.....	69
IV.7.	Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2004-2009 Berdasarkan Latar Belakang Tingkat Pendidikan .....	69
IV.8.	Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2009-2014 Berdasarkan Tingkat Usia .....	70
IV.9.	Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2009-2014 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	70
V.1.	Jumlah Responden Penelitian yang mengisi kuisioner berdasarkan tingkat pendidikan .....	71
V.2	Jumlah Responden Penelitian Masyarakat Yang Mengisi Kuisioner Berdasarkan Tingkat Umur .....	72



V.2.3 Apakah pengawasan DPRD terhadap Perencanaan pendapatan Daerah sudah berjalan dengan baik.....	77
V.2.4 Apakah pengawasan DPRD terhadap perencanaan usulan belanja rutin Daerah sudah berjalan dengan baik .....	78
V.2.5 Apakah pengawasan DPRD terhadap perencanaan pembangunan daerah telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat .....	79
V.2.6 Apakah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna sudah berjalan dengan baik .....	81
V.2.7 Apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan perencanaan pengawasan terhadap penyusunan APBD Kabupaten Natuna dengan baik .....	82
V.2.8 Apakah pelaksanaan pembahasan APBD Kabupaten Natuna sudah berjalan dengan baik.....	84
V.2.9 Apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan perencanaan pengawasan Penetapan APBD Kabupaten Natuna dengan baik .....	84
V.2.10 Apakah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna sudah tertata dengan baik .....	86
V.2.11. Apakah Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA). ....	87

V.2.12. Apakah DPRD Kabupaten Natuna telah melakukan pengawasan terhadap pembangunan fisik dengan baik.....	88
V.2.13 Apakah DPRD telah Mendengarkan laporan masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Natuna dengan baik.....	89
V.2.14 Apakah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah sesuai.....	90
V.2.15 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Fungsi Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Oleh Anggota DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2010 .....	92
V.2.16. Tahapan dan Rentang Waktu Reses Anggota DPRD.....	101
V.2.17 . Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2009-2014 Berdasarkan Latar Belakang Tingkat Pendidikan.....	105

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang Masalah**

Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Namun pencapaian tujuan tersebut memerlukan persyaratan tertentu, dan memerlukan penjabaran operasional lebih lanjut. Persyaratan yang harus ada antara lain terciptanya kehidupan berdemokrasi, tegaknya supremasi hukum, penataan ulang pemerintahan (*reinventing government*), dan penguatan sumber daya manusia yang harus dipandang sebagai intellectual asset yang penting. Sedangkan dalam penjabaran operasionalnya dibutuhkan seperangkat sistem reformasi seperangkat sistem administrasi publik yang terpadu meliputi reformasi anggaran, sistem informasi akuntansi, audit dan reformasi kelembagaan, setidaknya dari tiga hal diatas maka bidang akuntansi dapat berperan. Tantangan untuk merealisasikan tujuan diatas sangatlah berat, mengingat perilaku usaha dan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah dalam kurun waktu yang sangat panjang telah tercemar dengan berbagai tindakan, kegiatan, dan modus usaha yang tidak sehat bermuara pada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN) .

Upaya reformasi yang telah melahirkan ketetapan MPR Nomor XV/ MPR/ 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah: pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara kesatuan republik Indonesia, pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan

baik berupa undang- undang (UU) Maupun peraturan pemerintah (PP). Pelaksanaan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya undang- undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang- undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan pemerintahan pusat dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta telah membuka jalan bagi pelaksanaan reformasi sektor publik di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 42 menyatakan Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Bupati/Walikota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati/Walikota, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;

- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan daerah; dan
- f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Selanjutnya anggota DPRD Kabupaten memiliki hak yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 44 ayat (1), hak tersebut adalah mengajukan Rancangan Perda, mengajukan pertanyaan kepada Bupati, menyampaikan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler dan administratif. Dalam hal menggunakan hak mengajukan pertanyaan, caranya anggota yang bersangkutan menyusun pertanyaan secara tertulis, singkat dan jelas. Pertanyaan tersebut lalu disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD kemudian mengadakan rapat untuk menilai apakah pertanyaan yang diusulkan itu layak atau tidak untuk disampaikan kepada Bupati. Jika dinilai layak, maka Pimpinan DPRD membentuk panitia musyawarah. Setelah mendapat persetujuan dalam Panitia Musyawarah, Pimpinan DPRD meneruskan kepada Bupati.

Selain hak mengajukan pertanyaan kepada Bupati, di ayat (2) anggota DPRD juga memiliki hak protokoler, keuangan dan administratif yang pelaksanaannya diatur oleh DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain kedudukan, fungsi, tugas, hak dan wewenang, tentunya DPRD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki kewajiban yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 45 diantaranya:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- e. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggungjawab moral dan politis terhadap daerah pilihannya;
- h. Menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;
- i. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Berbeda dengan semangat reformasi Tahun 1998, ternyata jalannya demokrasi setelah pemilu 1999 berjalan agak kurang mulus, terutama dalam berbagai skandal dan tuduhan “politik uang” di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Lingkup dan besaran daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten menurut UU No. 27 Tahun 2009 tergambar dalam ketentuan berikut:

- a. Daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten adalah Kecamatan atau Gabungan Kecamatan.
- b. Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- c. Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada prinsipnya, Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.. Dengan adanya undang- undang No.32 tahun 2004 terjadi perubahan yang sangat signifikan mengenai hubungan legislatif dan eksekutif di daerah karena kedua lembaga tersebut memiliki kekuatan yang sama dan bersifat sejajar menjadi mitra. Dalam Pasal 19 ayat (2) Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.

Implikasi positif dari berlakunya undang- undang tentang otonomi daerah yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi, dan hak- hak DPRD, diharapkan DPRD yang selanjutnya disebut dewan akan lebih aktif didalam menanggapi aspirasi yang berkembang dimasyarakat, dan kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama kepala daerah ( Bupati) dampak lain yang muncul dengan adanya otonomi daerah ini adalah tuntutan terhadap pemerintah setempat untuk menciptakan pemerintahan yang *good*

*government* sebagai prasyarat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Sehubungan dengan hal itu maka peran dewan menjadi meningkat dalam mengontrol kebijakan pemerintahan.

Menurut PP nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran menjelaskan bahwa:

- 1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan
- 2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksaan eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran Lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu:
  - a. Fungsi legislasi ( fungsi membuat perundang- undangan )
  - b. Fungsi anggaran ( fungsi menyusun anggaran )
  - c. Fungsi pengawasan ( fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif ).

Selanjutnya Pengelolaan keuangan daerah perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam APBD yang wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Rakyat sebagai warga negara (*citizen*) yang telah memberikan legitimasi politik kepada pemerintah dan sebagai pembayar pajak (*tax payer*) memiliki hak untuk memperoleh pelayanan atas kepentingannya dan ikut mengawasi pemerintahan dan penggunaan uang. Di sini akan berlaku prinsip *no tax without representation*. Di sini pula terlihat urgensinya lembaga perwakilan (DPRD) bagi rakyat.



DPRD memiliki fungsi, yang salah satunya adalah penganggaran (*budgeting*) dan mempunyai tugas/wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan harus dilakukan pada keseluruhan tahapan dalam siklus anggaran, yakni :

1. Persiapan dan penyusunan anggaran. Sesuai pedoman pengelolaan keuangan daerah (3 UU Keuangan Negara, PP No. 58/2005 dan Permendagri No. 13/2006) DPRD harus terlibat dalam perumusan Kebijakan Umum APBD dan harus dapat melakukan taksiran pengeluaran (sesuai program yang berpihak kepada rakyat) atas dasar taksiran pendapatan.
2. Ratifikasi. Di sini perlu kejelian DPRD dalam membahas anggaran dengan mendasarkan pada peraturan, dokumen perencanaan, kebijakan umum dan dasar pemikiran yang rasional.
3. Implementasi, dan
4. Pelaporan dan Evaluasi.

Saat ini apakah yang dilakukan oleh DPRD telah sesuai dengan acuan yang ada bahwa APBD disusun dengan berbasis kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kerja (*outcome*) dari perencanaan alokasi biaya (*input*) yang ditetapkan. Setiap alokasi biaya dalam APBD harus dikaitkan dengan tingkat pencapaian pelayanan tertentu kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daerah lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan meningkatkan kesejahteraannya. Pembahasan anggaran di DPRD

dilakukan dalam beberapa tahap yang melibatkan berbagai alat kelengkapan Dewan, seperti Panitia Anggaran dan Komisi-komisi.

Kabupaten Natuna dengan anggaran yang besar adalah sebuah beban tersendiri bagaimana melaksanakan tanggung jawab terhadap Anggaran, jika dibandingkan dengan sebagian wilayah kabupaten lain yang ada di Indonesia Anggaran Kab. Natuna dikategorikan besar, Total APBD Natuna Tahun 2010 yang belanja daerahnya sebesar Rp 850 M yang terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp 14 miliar, belanja langsung sebesar Rp 481 M, belanja tidak langsung Rp352 M, pendapatan daerah yang lain yang sah Rp17 M. (Riky Rinovsky, Minggu, 28 Februari 2010).

Dari APBD yang ditampilkan di atas jelaslah bahwa Setiap SKPD Kabupaten Natuna harus melakukan perhitungan yang matang terhadap setiap Kegiatan atau program kerja agar sesuai dengan kebutuhan dan program yang akan disusun dan telah disusun, Selain itu memudahkan pengkajian yang akan Dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melakukan pengesahan Anggaran. Natuna dengan anggaran yang besar pada tahun 2010 sekilas bisa di katakan akan bisa menunjang setiap pembangunan baik di bidang sosial, budaya, seni, spirtual dan hal-hal lainnya.

Anggaran yang besar tidaklah menjanjikan suksesnya setiap Program Kerja, Natuna mempunyai pekerjaan rumah yang tidak sedikit dengan Anggarannya, yang menjadi sorotan disini adalah dalam hal yang lebih berbentuk bangunan fisik, pemanfaatan anggaran dalam pembangunan fisik sangatlah

banyak, namun juga terdapat fenomena lain yang terjadi pada Tahun 2010 akibat kurangnya pengawasan pelaksanaan anggaran antara lain adalah:

1. Terlambatnya Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010 yaitu pada Tanggal 16 Februari 2010 sehingga pengesahan APBD molor hingga 27 Februari 2010 hal ini bisa menghambat tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat hal ini sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 116 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang penyusunan dan penetapan paling lambat 31 Desember 2009. “Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar pemerintah daerah menyusun dan menetapkan APBD tahun 2010 paling lambat 31 desember 2009”.
2. Molornya realisasi APBD hingga 11 Maret 2010 menyebabkan lambatnya perekonomian masyarakat Natuna yang selama ini bergantung pada penggunaan dana APBD. “Lambatnya realisasi pasca Pengesahan APBD Natuna 2010 menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap roda perekonomian daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007. Pada pasal 87 penyampaian rancangan KUA dan PAS tersebut telah diatur dalam aturan tersebut telah dibatasi pengajuan rancangan KUA dan PAS

paling lambat Juli tahun anggaran berjalan” nilai ketua Lsm. Gerbang Utara. (Riky Rinovsky, Kamis, 11 Maret 2010)

3. Selanjutnya pembangunan jalan yang menghubungkan antara dua kecamatan yaitu Bunguran Utara dan Bunguran Barat, dan menghubungkan daerah tersebut ke wilayah Kabupaten, namun tidak terlaksana maksimal, hanya berupa jalan yang tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan belum terhubung sehingga penyelesaian pada anggaran 2011, selanjutnya pengaspalan jalan dari Kecamatan Bunguran Barat ke daerah Kota Ranai, sebagai Kota Kabupaten yang ditargetkan penyelesaian pada anggaran 2009 dan 2010 hingga kini belum rampung. (oleh KABID Jasa Kontruksi Dinas PU Natuna Sihar Simamora 2011)
4. Jalan penghubung antara Batubi Jaya dan Kota Ranai sampai sekarang belum rampung, bahkan tidak ada anggaran untuk meneruskan pembangunan jalan tersebut, padahal APBD Kabupten Natuna mencapai Rp. 1,4 Triliun, dengan anggaran yang sebesar ini tidak ada yang tidak mungkin. (oleh KABID Jasa Kontruksi Dinas PU Natuna Sihar Simamora 2011).
5. Contoh lain adalah pembangunan Masjid di Kelurahan Kampung Ujung, Kecamatan Subi yang mendapat kucuran dana APBD tahun 2007 sampai sekarang belum rampung (Kompsas.com 25 november 2011).

6. Selajutnya pembangunan Mess Natuna Pemerintah Kabupaten Natuna terbengkalai tidak ada tanggung jawanya, proyek yang menghabiskan dana sebesar Rp. 2 milyar ini dari tahun 2007 sampai sekarang masih terbengkalai begitu saja semestinya Pemkab Natuna dalam melakukan pembangunan satu proyek harus dilakukan secara matang dan terukur. Yang pasti, setiap proyek yang dilakukan itu harus selesai sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.( Anggota (DPRD) Kepri, Sofyan Samsir, 2011).

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali tentang **“ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN NATUNA TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) ANGGARAN TAHUN 2010”**.

## **I.2 Perumusan Masalah**

DPRD Kabupaten adalah salah satu unsur pemerintah daerah Kabupaten. Kedudukan DPRD Kabupaten adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila. Diharapkan Keberadaan DPRD Kabupaten Natuna bisa menentukan arah perubahan yang signifikan bagi kemajuan daerah Kabupaten Natuna dan memperjuangkan keinginan dari masyarakat, maka sangat diharapkan keseriusan dan kesungguhan dari anggota DPRD Kabupaten Natuna dalam memaksimalkan pengawasan APBD.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Anggaran Tahun 2010?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai perumusan masalah tersebut di atas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010.
2. Untuk mengetahui Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Natuna untuk meningkatkan fungsi pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
3. Untuk mengetahui Apakah Faktor penghambat yang ditemukan dalam melakukan fungsi pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Sumbangan pikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu sosial dan politik.

2. Bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk mempeleajari tentang DPRD Kabupaten Natuna.
3. Untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi penulis.
4. Menambah bahan rujukan dan menambah khazanah kepustakaan.

### **I.5 Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar, penelitian ini akan dituangkan dalam lima bab, yaitu:

#### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### **Bab II: Telaah Pustaka**

Bab ini menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu serta formulasi hipotesis.

#### **Bab III: Metode Penelitian**

Dalam bab ini diuraikan berbagai hal, diantaranya: sampel penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, metode penelitian, dan pengujian hipotesis.

#### **Bab IV: Gambaran Umum Objek Penelitian.**

Bab ini merupakan bab yang berisikan keberadaan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna, struktur organisasi dan uraian tugas sub-sub bagian.

**Bab V : Analisis Dan Pembahasan**

Bab ini berisi hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian dan analisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil yang didapat dalam penelitian berupa keseluruhan atau sebagian, baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan harapan umum ataupun peneliti. Dalam bab ini juga dipaparkan alasan kesesuaian dan ketidaksesuaian hasil penelitian. Selain itu dalam bab ini, dijelaskan dan dibandingkan pula hasil yang diperoleh dari penelitian sebelumnya.

**Bab VI : Kesimpulan dan Penutup**

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, sehingga akan diperoleh kesimpulan akhir dari penelitian dan saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya serta implikasi penelitian.



## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

Kerangka teori merupakan landasan berpikir untuk melaksanakan penelitian dan teori yang dipergunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, dan konstruksi, definisi dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. (Singarimbun, 2001:47). Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka akan dikemukakan beberapa konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### **II.1 Pengertian Pengawasan**

Pada dasarnya rencana dan pelaksanaan merupakan satu kesatuan tindakan, walaupun hal ini jarang terjadi. Pengawasan diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil terapai.

Menurut Murdick pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Proses dasarnya terdiri dari tiga tahap:

1. Menetapkan standar pelaksanaan,
2. pengukuran pelaksanaan dibandingkan dengan standar, dan
3. menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standard rencana.

Menurut Winardi (2000, hal. 585) "Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan".

Menurut Basu Swasta (1996, hal. 216) "Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan".

Lebih lanjut menurut Kadarman Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan (2001, hal. 159).

Selanjutnya Fayol dalam Harahap (2001:10) mengemukakan bahwa pengawasan adalah upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya di kemudian hari.

Sedangkan Menurut paham klasik, pengawasan merupakan coercion atau compelling artinya proses yang bersifat memaksa-maksa agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan dapat disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan.

## **II.2 Jenis-Jenis dan Tipe-Tipe Pengawasan**

### **a. Jenis-jenis pengawasan**

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

#### **1. Pengawasan Intern dan Ekstern**

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan."

Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

## 2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

### 3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan

pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.”

### 4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechtmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.”

#### b. Tipe-Tipe Pengawasan

Dalam pengawasan terdapat beberapa tipe pengawasan seperti yang diungkapkan Winardi (2000, hal. 589). Fungsi pengawasan dapat dibagi dalam tiga macam tipe, atas dasar fokus aktivitas pengawasan, antara lain:

1. Pengawasan Pendahuluan (*preliminary control*). Prosedur-prosedur pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Dipandang dari sudut prespektif demikian, maka kebijaksanaan-kebijaksanaan merupakan pedoman-pedoman untuk tindakan masa mendatang. Tetapi, walaupun demikian penting untuk membedakan

tindakan menyusun kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan mengimplementasikannya.

Merumuskan kebijakan-kebijakan termasuk dalam fungsi perencanaan sedangkan tindakan mengimplementasi kebijaksanaan merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Pengawasan pendahuluan meliputi:

1. Pengawasan pendahuluan sumber daya manusia.
  2. Pengawasan pendahuluan bahan-bahan.
  3. Pengawasan pendahuluan modal;
  4. Pengawasan pendahuluan sumber-sumber daya finansial
2. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*)
- Concurrent control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk:
1. Mengajarkan para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode-metode serta prosedur-prsedur yang tepat.
  2. Mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Proses memberikan pengarahan bukan saja meliputi cara dengan apa petunjuk-petunjuk dikomunikasikan tetapi ia meliputi juga sikap orang-orang yang memberikan penyerahan.
  3. Pengawasan Feed Back (*feed back control*) Sifat kas dari metode-metode pengawasan feed back (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. Adapun sejumlah

metode pengawasan feed back yang banyak dilakukan oleh dunia bisnis yaitu:

- a. Analysis Laporan Keuangan (*Financial Statement Analysis*)
- b. Analisis Biaya Standar (*Standard Cost Analysis*).
- c. Pengawasan Kualitas (*Quality Control*)
- d. Evaluasi Hasil Pekerjaan Pekerja (*Employee Performance Evaluation*)

### **II.3 Pengawasan Anggaran**

Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. Adanya pelayanan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat. Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah

Pengawasan adalah salah satu pilar terpenting dalam proses politik demokratis, fungsi pengawasan dilaksanakan untuk menjamin terwujud dan efektifnya akuntabilitas publik dari berbagai lembaga tata pemerintahan. Dalam demokrasi, berbagai lembaga melaksanakan fungsi pengawasan dan salah satunya adalah DPRD, fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga ini adalah unik, karena orientasinya adalah terpenuhinya proses dan kebijakan politik. (yulenita kahar, 2005:59).

Dewan perwakilan rakyat daerah adalah badan legislatif daerah (UU no 22 tahun 1999, pasal 1 huruf c), sebagai badan legislatif daerah sejajar dengan pemerintah daerah dan bukan bagian dari pemerintah daerah. Ryaas Rasyid menilai perlu penguatan peran DPRD, baik proses legislasi maupun atas jalannya pemerintahan daerah sebagai konsekuensi logis kebijakan demokrasi pemerintahan, termasuk konsekuensi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pembiayaan dan belanja daerah. Hal ini seperti tercantum dalam pasal 61 UU No 22 Tahun 2003 tentang susunan, kedudukan MPR, DPR dan DPRD, yang berbunyi:

- a. Legislasi;
- b. Anggaran;
- c. Pengawasan

Pasal 62 UU nomor 22 Huruf b dan Huruf d tahun 2003 bagian tugas dan wewenang berbunyi:

- a. Menetapkan APBD bersama Gubernur
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Gubernur, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.

#### **II.4 Pengawasan Keuangan Daerah Oleh DPRD**

Pengawasan terhadap pelaksanaan perlu dilakukan, hal ini untuk memantau apakah pelaksanaan anggaran tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta berjalan efisien, efektif, dan ekonomis. Proses pengawasan disini diartikan sebagai proses kegiatan yang ditujukan untuk

menjamin agar pelaksanaan pemerintah daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Keppres No. 74 Tahun 2001).

Selain itu untuk mendukung akuntabilitas pemerintah daerah disamping diperlukan pengawasan yang bersifat eksternal yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi pengawasan secara internal selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK, BPKP, serta DPRD; sehingga akan diperoleh suatu laporan pelaksanaan pemerintahan yang diperoleh berdasarkan prosedur check and balance.

Dalam penelitian ini, proses pengawasan akan difokuskan pada pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Dalam melaksanakan tugas pengawas tersebut ,DPRD memiliki bagian khusus yang disebut panitia anggaran. Pengawasan yang dilakukan DPRD atau dewan dapat bersifat langsung maupun tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan yang bersifat langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri ditempat pekerjaan dan minta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan melalui pre- audit sebelum pekerjaan dimulai. Sedangkan pengawasan represif melalui pos audit melalui pemeriksaan ditempat ( Sopanah dan Mardiasmo, 2003).



## II.5 Otonomi Daerah

Gagasan Otonomi Daerah yang melekat pada pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memiliki kaitan yang sangat erat dengan demokratisasi kehidupan politik dan pemerintahan baik ditingkat lokal maupun nasional. Asumsinya, agar demokrasi bisa terwujud maka daerah harus memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Terlepas dari pro-kontra pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota yang menimbulkan ketegangan dan tarik ulur kewenangan dengan pemerintah atasnya, kita harus mengakui bahwa kebijakan desentralisasi di Indonesia yang secara radikal dilaksanakan tahun 2001 telah membuka peluang bagi berdirinya sendi-sendi demokrasi di tingkat lokal.

**M. Ryaas Rasyid dkk** (2005:173), Visi Otonomi Daerah itu dapat dirumuskan dalam tiga ruang lengkap intraksinya yang utama yaitu Politik, Ekonomi, serta sosial dan budaya.

Berdasarkan visi ini, maka konsep dasar Otonomi Daerah merangkul hal-hal berikut ini:

1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik Kepala Daerah.
2. Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan Kepala Daerah.
3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintah yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula.

4. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan.
5. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan Negara dan Daerah.
6. Perwujudan desentralisasi fiskal.
7. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial sebagai suatu bangsa.

Kewenangan yang luas dalam bentuk “Otonomi Daerah” akan memungkinkan daerah mewujudkan minimal dua visi strategis demokratik.

*Pertama*, komitmen untuk mewujudkan kebebasan individu yang disertai tanggungjawab dalam pelaksanaannya, artinya adanya kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap tugas dan kinerjanya.

*Kedua*, gagasan tentang adanya kedaulatan rakyat dan kesetaraan politik. Dalam konsep ini, tanggungjawab pelaksanaan pemerintahan tidak hanya berada ditangan pemerintah yang secara formal ditunjuk untuk tugas itu, tetapi juga berada ditangan rakyat yang berdaulat, bebas dan memiliki hak-hak yang sama. Terutama dalam hal keterlibatan masyarakat dan *stake holder* dalam pembuatan kebijakan. Visi demokratik ini mengasumsikan bahwa kemauan untuk menerima keadaan tentang bagaimana masyarakat seharusnya diatur dan bagaimana keputusan tentang prinsip-prinsip kebijakan diambil.

## II.6 DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya yang disebut dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna selanjutnya disebut sebagai DPRD Natuna adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan ditingkat Kabupaten Natuna.

Fungsi utama DPRD Kabupaten adalah legislasi dan pengawasan, yaitu membuat Peraturan Daerah dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten. Disamping fungsi legislasi dan pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten, terdapat fungsi anggaran yaitu kewenangan untuk menetapkan APBD.

Untuk melaksanakan Tugas Dan Wewenanganya, DPRD Kabupaten mempunyai tugas:

1. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama;
2. Menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Bupati/Walikota
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati/Walikota, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;

4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan daerah; dan
6. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Selanjutnya anggota DPRD Kabupaten memiliki hak mengajukan Perda, mengajukan pertanyaan kepada Bupati, menyampaikan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler dan administratif. Dalam hal menggunakan hak mengajukan pertanyaan, caranya anggota yang bersangkutan menyusun pertanyaan secara tertulis, singkat dan jelas. Pertanyaan tersebut lalu disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD kemudian mengadakan rapat untuk menilai apakah pertanyaan yang diusulkan itu layak atau tidak untuk disampaikan kepada Bupati. Jika dinilai layak, maka Pimpinan DPRD membentuk panitia musyawarah. Setelah mendapat persetujuan dalam Panitia Musyawarah, Pimpinan DPRD meneruskan kepada Bupati.

Selain hak mengajukan pertanyaan kepada Bupati, anggota DPRD juga memiliki hak protokoler, keuangan dan administratif yang pelaksanaannya diatur oleh DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain kedudukan, fungsi, tugas, hak dan wewenang, tentunya DPRD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki kewajiban yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 45 diantaranya:

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
5. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
6. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
7. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggungjawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya;
8. Menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;
9. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Berbeda dengan semangat reformasi tahun 1999, ternyata jalannya demokrasi setelah pemilu 1999 berjalan agak kurang mulus, terutama dalam

berbagai skandal dan tuduhan “politik uang” di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan terbitnya Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan yang teramat besar bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menurut asas Otonomi dan tugas dan pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **II.7 Konsep Anggaran Sektor Publik**

Anggaran didefinisikan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (mardiasmo. 2002) sedangkan penganggaran atau proses penyusunan anggaran adalah proses pengoprasionalan rencana dalam bentuk pengkualifikasian, biasanya dalam bentuk unit moneter, untuk kurun waktu yang ditentukan( Halim, et al,. 2000) jadi penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Menurut Anthony dan govindarajan (2003), proses penyusunan anggaran biasanya meliputi proses sebagai berikut:

1. Menyelaraskan dengan rencana strategi
2. untuk mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian dalam Organisasi
3. untuk memberikan tanggung jawab kepada menejer atau pimpinan, guna mengotorisasi jumlah dana yang dapat digunakan, dan untuk memberitahukan hasil yang mereka capai, serta

#### 4. untuk mencapai kerja sama.

Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung aspek yang bersifat politis sehingga bukan hanya proses ekonomi, hal ini sangat berbeda dalam penganggaran sektor swasta, anggaran publik merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik. Namun berbeda dengan sektor publik, dimana anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen pertanggung jawaban atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo, 2002).

Penyusunan anggaran dalam institusi publik berkaitan dengan proses penentuan alokasi jumlah dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas pemerintah dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilaksanakan. Anggaran merupakan implementasi hasil perumusan strategi dan perencanaan strategi yang telah dibuat dan ditetapkan. Proses penyusunan anggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan atau strategi yang sudah disusun sebelumnya. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan suatu organisasi publik ataupun swasta (Mardiasmo, 2002). Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi: aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek tanggung jawab publik.

Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses penganggaran harus efektif jika diawasi oleh

lembaga pengawas khusus yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran.

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan:

- (1) beberapa biaya atas rencana -rencana yang dibuat ( pengeluaran/ belanja) ; dan
- (2) berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan ).

Menurut Mardiasmo (2002), anggaran sektor publik mempunyai fungsi utama, yaitu:

1. sebagai alat perencanaan
2. alat pengendalian
3. alat kebijakan fiskal
4. alat politik
5. alat komunikasi dan koordinasi
6. alat penilaian kinerja
7. alat motivasi, dan
8. alat menciptakan ruang publik.
9. Norma umum anggaran sektor publik

Agar strategi yang telah ditetapkan dapat dicapai, maka pemerintah daerah perlu untuk tetap memiliki komitmen bahwa anggaran daerah adalah perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif dan legislatif, dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran sektor publik atau anggaran daerah harus mengacu pada prinsip- prinsip berikut:



1. keadilan anggaran
2. efisiensi dan efektivitas anggaran
3. anggaran berimbang dan defisit
4. disiplin anggaran
5. transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas anggaran.
6. Proses penyusunan anggaran sektor publik

Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses penyusunan anggaran memiliki tujuan , yaitu:

- 1) membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
- 2) Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
- 3) Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
- 4) Meningkatkan transparansi dan pertanggung jawaban pemerintah kepada DPR/ DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo (2002) tahapan –tahapan yang ada dalam penyusunan anggaran sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan dan penyusunan anggaran ( *budget preparation*)

Pada tahap persiapan dan penyusunan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang

cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran. Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian khusus adalah terdapatnya faktor ketidakpastian yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Besarnya suatu mata anggaran sangat tergantung pada teknik dan sistem anggaran yang digunakan.

## 2. Tahap ratifikasi anggaran ( *budget ratification* )

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif (kepala daerah) dituntut tidak hanya memiliki “ *managerial skill* ” namun juga harus memiliki “ *political skill* , “ *salesmanship* , “ dan “ *coalition building* ” yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan – pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

## 3. Tahap pelaksanaan anggaran ( *budget implementation* )

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini, hal penting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan

sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang digunakan hendaknya juga mendukung pengendalian anggaran.

#### 4. Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Apabila dalam tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pada tahap pelaporan dan evaluasi anggaran biasanya tidak akan menemui banyak masalah.

#### 5. Ruang lingkup, peran, dan fungsi DPRD

Sesuai dengan paradigma baru yang berkembang saat ini, DPRD mempunyai posisi, tugas, dan fungsi yang strategis dan penting dalam perencanaan dan pengawasan, pengelolaan keuangan daerah. Fungsi pengawasan dan perencanaan hendaknya sudah dilakukan DPRD sejak proses penjaringan aspirasi masyarakat hingga penetapan arah dan kebijakan umum APBD serta penentuan strategi dan prioritas APBD. Sementara itu, fungsi pengawasan hendaknya dilakukan oleh DPRD pada saat perencanaan APBD, pelaksanaan APBD, dan pelaporan APBD.

## 6. Evaluasi system anggaran

Dalam instruksi menteri dalam negeri No. 4 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kebijaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 1999/2000 disebutkan bahwa APBD harus secara riil mencerminkan niat pemerintah daerah untuk mengantisipasi upaya pemulihan ekonomi daerah dan memenuhi kehendak masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam pengalokasian dan pengelolaan anggaran daerah secara efisien dan efektif. Strategi umum yang harus dilakukan dalam menghadapi kondisi tersebut adalah:

1. Meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja
2. Melakukan penghematan yang diikuti dengan peningkatan disiplin anggaran, dan
3. Pengetatan serta perbaikan mekanisme pelaksanaan anggaran yang terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN).

## II.7 Pandangan Islam Tentang Pemimpin

Dalam rangka menuju DPRD yang ideal, maka secara nyata terasa adanya kesenjangan (*gap*) antara DPRD dengan masyarakat secara timbal balik. Hal ini disebabkan karena sistem komunikasi yang kurang lancar dan kurang efektif atau karena minimnya mekanisme kontak antara DPRD dengan rakyat. Sistem kerja Hubungan Masyarakat DPRD belum berfungsi dengan baik dan yang paling urgensi adalah tidak adanya kejelasan terhadap mekanisme penyampaian

transparansi dan akuntabilitas terhadap tugas dan kinerjanya DPRD kepada masyarakat pemilih di daerah pemilihannya, Allah berfirman dalam QS. Al-Anfaal; 27:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”*

Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya:

*“(Imam al-Bukhari menyatakan) Muhammad bin Sinan menyampaikan (riwayat) kepada kami, Qulaih bin Sulaiman telah menyampaikan (riwayat) kepada kami, Hilal bin Ali telah menyampaikan (riwayat) kepada kami, (riwayat itu) dari Atha’, dari Yasar, dari Abu Hurairah r.a yang berkata: Rasulullah Saw bersabda: Apabila suatu amanah, disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya. (Abu Hurairah bertanya: bagaimana meletakkan amanah itu, ya Rasulullah? Beliau menjawab: Apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.”*

## **II.8 Indikator Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap APBD**

Salah satu fungsi dewan yang sentral menjadi perhatian dan pembicaraan semua kalangan adalah fungsi pengawasan. Dalam ilmu administrasi fungsi pengawasan mengandung tindakan lembaga yang bersifat preventif dan preventif yang mengandung makna mengevaluasi dan mengawasi program-program pemerintah daerah. Oleh karena mengandung makna mengevaluasi, konsekwensinya adalah semua kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan program-programnya tidak serta merta termentahkan oleh karena sebuah pengawasan. Dalam melakukan fungsi pengawasannya terhadap penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah, DPRD memiliki indikator penilaian yang

telah ditentukan oleh hukum dan undang-undang yang berlaku, yakni bersumber dari Undang undang No. 27 tahun 2004 yaitu

1. Perencanaan pengawasan anggaran yang menyangkut seluruh proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD
2. Tahapan pelaksanaan yang meliputi alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah, laporan pelaksanaan kegiatan, pengawasan terhadap pembangunan fisik, dan laporan masyarakat.
3. Tahap pertanggung jawaban yang disampaikan oleh pemerintah yakni dilihat dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pemerintah dan laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah.

Disamping itu, DPRD juga melaksanakan beberapa cara dalam mengukur kinerja pemerintah dalam anggaran pendapatan belanja daerah, yaitu dengar pendapat dengan mitra, melakukan kunjungan kerja, pembentukan pansus serta pembentukan panitia kerja yang dibentuk sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Natuna.

Dalam pelaksanaan pengawasan DPRD pada dasarnya tentu mengacu pada pasal 42 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 dan mekanismenya didasarkan pada Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Natuna. Perlu juga diingat bahwa pengawasan merupakan fungsi yang paling intensif yang dilakukan DPRD, bahwa bagaimana DPRD menjalankan fungsi pengawasannya baik secara politik maupun administratif melalui semua peran dan alat kelengkapannya (Pimpinan, Komisi, Panitia Musyawarah, Badan

Kehormatan, Panitia Anggaran, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan) dengan menyampaikan pertanyaan, melakukan interpelasi maupun angket, serta pendidikan politik dalam setiap kegiatannya. Tentu kepada semua objek yang diawasi, khususnya dalam kinerja eksekutif.

## **II.9 Defenisi Konsep**

Defenisi konsep dimaksudkan untuk menghindari interpretasi ganda dari variabel yang diteliti. Defenisi operasional merupakan operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari variabel-variabel tersebut.

1. Fungsi atau aktifitas manajemen adalah; perencanaan, pengorganisasian dan penyusunan staf, pembimbingan dan pengkoordinasian, penganggaran dan pengendalian.
2. Pengawasan adalah Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Sondang P.Siagian)
3. Anggaran adalah suatu proses sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan. Pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana itu sendiri, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil-hasil pelaksanaan rencana.” (Y. Supriyanto, 1985:227).

4. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Permendagri no 37 2010 pasal 1).

## **II.10 Konsep Operasional**

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan operasional yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur dari gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut.

Pada penelitian ini pengawasan yang di maksud adalah pengawasan legislatif sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa DPRD mempunyai Fungsi “melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah (PERDA) dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, pengawasan terhadap APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah”.

Selanjutnya konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman kepada UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang salah satu isinya membahas tentang fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun variabel pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang dimaksud adalah:

1. Perencanaan pengawasan anggaran yang meliputi :
  - a. Perencanaan pendapatan Daerah kabupaten Natuna
  - b. Perencanaan usulan belanja rutin Daerah kabupaten Natuna
  - c. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten Natuna
  - d. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)



- e. Bagaimana penyusunan APBD Kabupaten Natuna APBD Kabupaten Natuna.
  - f. Bagaimana pelaksanaan pembahasan APBD Kabupaten Natuna.
  - g. Bagaimana penetapan APBD Kabupaten Natuna APBD Kabupaten Natuna
2. Tahapan pelaksanaan Anggaran yang meliputi:
- a. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - b. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah Kabupaten Natuna dari APBD.
  - c. pengawasan pembangunan fisik oleh DPRD Kabupaten Natuna
  - d. Mendengarkan laporan masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Tahap pertanggung jawaban yang disampaikan oleh pemerintah yakni dilihat dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pemerintah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mendengarkan, menilai, dan memutuskan untuk memberikan rekomendasi kepada kepala daerah terhadap hasil Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.

Untuk Menjaga agar penelitian dapat mencapai tujuan yang diharapkan maka penulis menetapkan konsep operasional yang digunakan untuk mengukur indicator penelitian dengan menggunakan *Skala Likert*. Dimana variable yang akan diukur dijabarkan menjadi indicator variable. Kemudian indicator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa

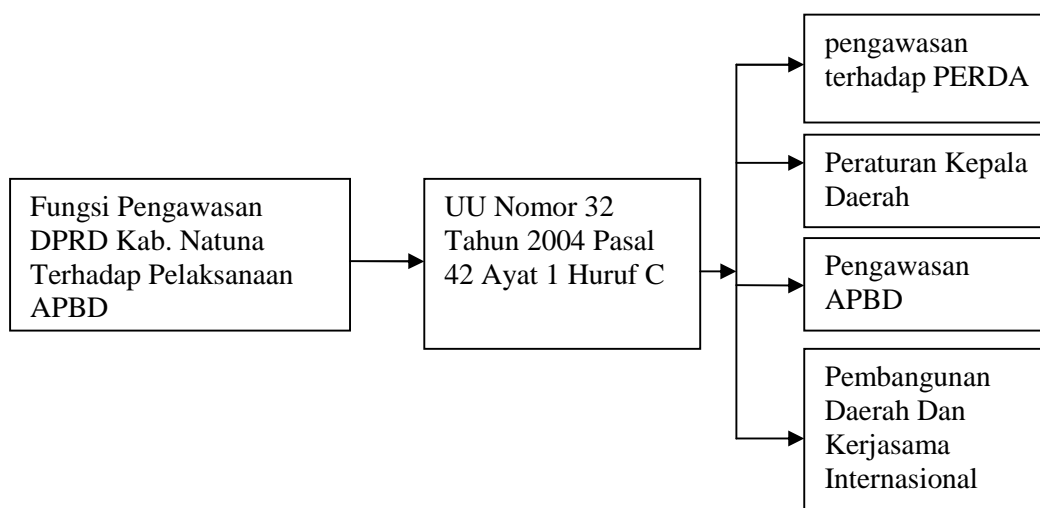
pernyataan atau pertanyaan (*Sudiono, 2007:107*). Jawaban Setiap instrument mempunyai gradiasi dari yang positif hingga yang negative berupa:

- a. Baik
- b. Kurang Baik
- c. Tidak Baik

## II.12 Kerangka Teori

Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**



## II.12 Hipotesis

Hipotesa adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang kebenarannya harus dibuktikan melalui data yang terkumpul (Sugiono, 2005:183). Berdasarkan uraian maka penulis merumuskan hipotesis yaitu “Diduga Fungsi Pengawasan Anggaran Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna belum berjalan dengan baik karena masih banyak penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama dalam hal Perencanaan pengawasan anggaran, Tahapan pelaksanaan Anggaran, Tahap pertanggung jawaban”.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **III.1. Jenis Penelitian**

Menurut **Sugiono (2003: 11)** jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Anggaran Tahun 2010.

#### **III.2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penulis menetapkan waktu penelitian selama 2 bulan yaitu dimulai tanggal 1 April sampai 30 Mei. Dalam penelitian ini Peneliti mengambil tempat penelitian pada Kantor DPRD Kab. Natuna.

#### **III.3 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005, 90).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi (Sugiyono, 2005, 91).

Dengan demikian teknik cuplikan (*sampling*) dalam penelitian ini bersifat (*purposive*), sehingga yang menjadi subyek penelitian (*responden*) adalah mereka yang dianggap dapat memberikan informasi yang memadai berkaitan dengan pertanyaan penelitian ini.

Oleh karenanya, terdapat beberapa subyek penelitian yang sengaja dipilih dan ditentukan peneliti sebagai sumber data. Subyek-subyek penelitian ini diantaranya:

1. Ketua DPRD Kabupaten Natuna.
2. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Natuna.
3. Komisi I DPRD Kabupaten Natuna.
4. Panitia anggaran (PANGGAR)
5. Kepala Bagian Naskah dan Dokumentasi DPRD Kabupaten Natuna.
6. Kepala Instansi Pemerintahan Kabupaten Natuna.
7. Beberapa tokoh masyarakat.
8. Beberapa Tokoh Pemuda

Informan ini terdiri dari:

1 orang Ketua DPRD Kabupaten Natuna, 1 orang Wakil I Ketua DPRD Kabupaten Natuna, 6 orang Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Natuna, 11 orang Panitia Anggaran, 1 orang Kepala Bagian Naskah dan Dokumentasi DPRD Kabupaten Natuna, 24 orang Kepala Instansi Pemerintahan Kabupaten Natuna, 10 orang tokoh masyarakat. 10 orang tokoh Pemuda.

Untuk jelasnya siapa saja populasi dan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel III.1. Jumlah Responden Dalam Penelitian**

No	Klasifikasi Informan	Populasi	Sample
1	Anggota DPRD Kabupaten Natuna	20	-
2	- Ketua DPRD Kabupaten Natuna	1	1
3	- Wakil I Ketua DPRD Kabupaten Natuna	1	1
4	- Komisi I DPRD Kabupaten Natuna	6	6
5	- Panitia Anggaran	11	6
6	Kabag. Naskah dan Dokumentasi DPRD Kab. Natuna	1	1
7	Kepala Instansi Pemerintahan Kab. Natuna	21	21
8	Tokoh Masyarakat	10	10
9	Tokoh Pemuda	10	6
	<b>Jumlah</b>	<b>61</b>	<b>52</b>

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011*

DPRD adalah wakil rakyat di daerah oleh karena itu mereka harus memperhatikan kepentingan masyarakat dimana tempat pemilihan mereka, masyarakat seharusnya ikut serta mengawasi kebijakan yang dilakukan oleh DPRD melalui pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, karna harus menganut asas transparansi dalam membuat kebijakan-kebijakan. Mengapa penulis mengambil tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dalam menilai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPRD hal ini di karenakan merekalah yang di anggap penulis orang-orang yang berkompeten dan mengetahui apa-apa yang menjadi kebijakan DPRD.

Yang dimaksudkan sebagai tokoh masyarakat dalam penelitian ini adalah mereka yang aktif atau sering mengikuti rapat-rapat penting yang dilakukan oleh DPRD diantara tokoh masyarakat itu adalah mereka yang disebut sebagai tokoh Agama, tokoh adat, anggota organisasi paguyuban yang ada di Natuna serta orang yang aktif dalam LSM, sedangkan yang dimaksud sebagai tokoh pemuda adalah mereka yang aktif dalam aksi-aksi terhadap kebijakan pemerintah dan mengikuti

kebijakan-kebijakan yang di ambil oleh DPRD mereka diantaranya Aktifis-aktifis BEM, KAMMI, HMI, dan Forum Komunikasi Mahasiswa Natuna Seluruh Indonesia (FKMNI).

Cara penentuan sampel yang dimaksud atau dipakai oleh penulis yaitu *purposive sampling* maksudnya adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Seperti mereka yang menurut penulis mengerti dan tahu maksud dan tujuan dari penelitian ini. (Prof. Dr. Sugiyono, 2007, 96).

#### **III.4. Jenis dan Sumber Data**

Untuk membantu dan menyelesaikan penelitian ini maka penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

##### **a. Data Primer**

Adalah data yang diperoleh dari responden yang terpilih, sebagai sampel penelitian, antara lain mencakup:

1. Data tentang pelaksanaan analisis fungsi pengawasan anggaran oleh Anggota Dewan di Kabupaten Natuna
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan anggaran oleh Anggota Dewan di Kabupaten Natuna.

##### **b. Data Sekunder**

Adalah data yang telah tersedia pada Kantor DPRD Kabupaten Natuna yang berhubungan dengan penelitian ini yang terdiri dari:

1. Gambaran umum mengenai Kantor DPRD Kabupaten Natuna.
2. Struktur organisasi Kantor DPRD Kabupaten Natuna.
3. Keadaan dan jumlah Anggota Dewan pada Kantor DPRD Kabupaten Natuna

Studi melalui kepustakaan, peraturan Perundang-Undangan, dan buku-buku yang relevan lainnya

### **III.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

a. Observasi.

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan mengambil informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara.

Wawancara dilakukan untuk membantu hasil jawaban dari penyebaran angket, karena tidak menutup kemungkinan hasil jawaban angket kurang memuaskan. Yang diwawancara adalah orang-orang yang memiliki posisi penting pada objek yang diteliti.

c. kuisioner.

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan instrumen pertanyaan tertulis kepada responden dengan dijawab secara tertulis pula oleh responden.

d. Studi dokumen

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan metode mengambil dokumen-dokumen atau bukti yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### **III.6 Analisis Data**

Untuk mengetahui fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Natuna terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penulis menggunakan penulisan deskriptif kualitatif data





## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **IV.1. Gambaran Umum Kabupaten Natuna**

##### **IV.1.1. Deskripsi Wilayah**

Kabupaten Natuna terletak di antara 2°LU sampai dengan 5°LU dan dari 104°BT sampai dengan 110°BT, terdiri dari daratan dan perairan dengan luas wilayahnya mencapai 141.901 km<sup>2</sup> dengan luas daratan 3.235,2 km<sup>2</sup> dan lautan 138.666 km<sup>2</sup>.

Wilayah Kabupaten Natuna terdapat 271 pulau besar dan kecil, tiga pulau besar diantaranya Pulau Bunguran, Pulau Jemaja dan Pulau Serasan.

Kabupaten Natuna memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Vietnam dan Kamboja;
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kepulauan Riau;
3. Sebelah Timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat;
4. Sebelah Barat dengan Semenanjung Malaysia dan Pulau Bintan Kabupaten Kepulauan Riau.

Berdasarkan kondisi geomorfologi, Kabupaten Natuna merupakan tanah berbukit dan bergunung batu. Dataran rendah dan landai banyak ditemukan dipinggir pantai. Ketinggian wilayah antar kecamatan cukup beragam, berkisar antara 3 m sampai 300 m dari permukaan laut dengan kemiringan 2 sampai 5 derajat, serta ada beberapa tempat terdapat lereng yang terjal.

Sedangkan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan yang tanah dasarnya mempunyai bahan granit dan *alluvial* serta tanah *organosol* dan *gley humus*.

Iklim di Kabupaten Natuna sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Maret dan Mei, ketika angin dari arah utara bertiup. Musim hujan terjadi pada bulan September sampai dengan Februari ketika arah angin bertiup dari Timur dan Selatan.

Curah hujan rata-rata setahun 2.000 mm<sup>3</sup> dengan kelembaban udara sekitar 85% dan temperatur 25°, dengan suhu udara berkisar antara 21° - 34°.

#### **IV.1.2. Demografi**

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pendaftaran Kependudukan Kabupaten Natuna, jumlah penduduk Kabupaten Natuna 2010 sebesar 69.319 jiwa, laki-laki 35.780 orang dan perempuan 33.449 orang.

Kabupaten Natuna mempunyai 12 kecamatan yang dipisahkan oleh lautan. Diantara kecamatan yang ada, yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Bunguran Timur tercatat sebagai daerah terpadat dengan 23.230 jiwa dan Kecamatan Pulau Laut jadi daerah berpenduduk paling sedikit yakni 2.200 jiwa.

#### **IV.1.3. Sosial Budaya dan Pendidikan**

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau

pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat. Perkembangan di bidang pendidikan dari tahun ke tahun di Kabupaten Natuna menunjukkan tren kenaikan termasuk wilayah pesisirnya. Hal ini dapat terlihat melalui indikator-indikator kuantitas dan kualitas institusi pendidikan, jumlah guru, murid dan tingkat partisipasi sekolah dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2005/2006, Taman kanak-kanak berjumlah 25 sekolah, 1.133 murid dan 101 guru dengan rasio murid terhadap guru 11,22 dan rasio murid terhadap sekolah 45,32. Selanjutnya pada tahun yang sama Sekolah Dasar berjumlah 134 buah dengan 13.710 murid dan 997 guru, dengan rasio murid terhadap guru 13,75 dan murid terhadap sekolah 102,31.

Data pendidikan menengah yang terdapat di Kabupaten Natuna terbatas pada SLTP, SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan saja. Pada tahun 2005/2006 terdapat 32 SLTP, 17 SMA dan 4 SMK dengan jumlah murid SLTP 3.419, murid SLTA 2.414 serta murid SMK “hanya” 285 siswa.

Produk utama yang dihasilkan di Kabupaten Natuna berasal dari sektor pertambangan yang terdiri dari Minyak, Gas Alam dan Barang Tambang. Sektor utama lainnya adalah Pariwisata, Perkebunan Kelapa dan Cengkeh serta hasil Perikanan.

#### 1. Pertambangan

Sektor pertambangan adalah potensi utama Kabupaten Natuna yang terdiri dari minyak, gas alam dan barang tambang. Hingga tahun 2005 terdapat 3 buah perusahaan minyak lepas pantai *Conocophilips*, *Star Energy*, dan *Premeir Oil*. Setidaknya terdapat 24 lokasi penggalan batu dan 22 lokasi penggalan pasir

diseluruh kecamatan kecuali Kecamatan Jemaja, Serasan dan Bunguran Barat. Kecamatan yang memiliki peluang investasi terbesar adalah Bunguran Timur dengan 18 lokasi penggalian batu dan 17 lokasi penggalian pasir.

## 2. Industri

Pengembangan industri yang berkembang di Kabupaten Natuna terdiri dari industri makanan dan minuman, perkayuan dan produk kayu serta industri produk berbahan logam yang sebagian besar merupakan industri berskala kecil.

## 2. Pertanian

Komoditas hasil ladang yang paling banyak ditamani adalah ubi kayu dengan produksi sebanyak 970 ton. Selain itu juga terdapat Jagung, Kentang Manis, Talas, Padi dan Kacang-kacangan. Pada tahun 2010, produksi sayur-sayuran seperti Kangkung, Bayam dan Mostar mencapai lebih dari 700 ton, tanaman pisang mencapai 6.812 ton dan Nenas sebesar 18 ton.

## 3. Perkebunan

Komoditas unggulan dari sektor perkebunan yaitu Lahan Perkebunan Karet, Kelapa dan Cengkeh. Ketiga komoditas unggulan ini terdapat diseluruh kecamatan. Perkebunan kelapa terbesar berada di Kecamatan Pulau Tiga dan Bunguran Timur.

## 4. Perternakan

Pada sektor perternakan, komoditas ternak yang diunggulkan adalah sapi yang dikembangkan di Bunguran Timur, Bunguran Barat dan Bunguran Tengah serta kambing yang ditenakkan di setiap kecamatan. Potensi terbesar dalam perternakan di Kecamatan Bunguran Barat dan Bunguran Timur.

## 5. Perikanan

Sektor Perikanan juga merupakan potensi utama di Kabupaten Natuna. Produksi ikan laut sebagian besar ditangkap di Perairan Bunguran Barat dan Bunguran Timur. Beberapa hasil laut seperti ikan dari jenis Napoleon, Kerapu, Tongkol, Sardin serta berbagai hasil laut lainnya seperti udang dan kepitingan.

## 6. Pariwisata

Walaupun terdapat banyak potensi wisata yang ditunjang oleh keindahan alam dan keanekaragaman hayati, namun sektor pariwisata belum dikelola secara optimal. Beberapa peluang investasi dalam pengembangan wisata kini menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Natuna. Diantaranya peluang tersebut adalah objek wisata yang terdapat di Padang Melang, Pantai Tanjung Di Kecamatan Bunguran Timur, dan Pantai Sisi di Kecamatan Serasan yang didalamnya terdapat Air Celupan Tujuh Warna yang membutuhkan pengembangan resort, hotel/motel, cottage, restoran seafood, kafe, serta fasilitas rekreasi dan olah raga air.

### **IV.1.4. Pemerintahan**

Dalam suatu institusi pemerintahan modern, perumusan visi dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting mengingat semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, peradaban masyarakat dan arus globalisasi, yang pada intinya telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam hal ini berarti bahwa pemerintah sebagai agen pembangunan (*Agent of Development*) semakin dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

Selanjutnya dalam konteks otonomi daerah, sebagai mana dimandatkan dalam Undang-undang nomor 22 dan 25 tahun 1999 beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah demi kesinambungan pembangunan semakin berat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mampu mengemban amanah pembangunan melalui pemanfaatan segenap potensi sumber daya yang ada di daerah secara efisien dan efektif. Untuk itu diperlukan perumusan visi dengan tepat.

Di sisi lain melalui perumusan visi tersebut, masyarakat akan dapat mengetahui seberapa jauh komitmen dan strategi Pemerintah Daerah untuk membangun dan mengembangkan berbagai aspek kehidupan mereka di masa yang akan datang, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan untuk bertindak dalam rangka memanfaatkan peluang sekaligus dapat mengantisipasi dampak negatif dari kemajuan dan perubahan peradaban dunia.

Secara konseptual, visi merupakan pandangan jauh ke depan dan merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu institusi di masa depan. Penyusunan visi didahului dengan 5 I dan 1 F. Yang dimaksud dengan 5 I adalah *Initiation, Ideas-idealism, Information, Identification dan Inception*. Sedangkan yang dimaksud 1 F adalah Forecasting, yakni pemikiran tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dimasa depan.

Berdasarkan kajian 5 I dan 1 F tersebut, maka visi dalam membangun Kabupaten Natuna adalah ***"Menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Riau Kepulauan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang handal untuk mewujudkan masyarakat madani, pada tahun 2020."***

Seluruh masyarakat Kabupaten Natuna berkomitmen untuk menjadikan Kabupaten Natuna sebagai "pusat pertumbuhan ekonomi di Riau Kepulauan" yaitu dapat berfungsi sebagai salah satu lokomotif pembangunan perekonomian di kepulauan riau, nasional maupun regional yang mampu meningkatkan kualitas taraf hidup dan memberikan manfaat kesejahteraan/memberikan kesempatan berusaha kepada masyarakat.

Upaya yang akan dicapai untuk mewujudkan komitmen di atas adalah melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang didukung dengan sumber daya yang handal baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Melalui upaya tersebut di atas, maka seluruh masyarakat Kabupaten Natuna memiliki kesungguhan hati untuk "terwujudnya masyarakat madani". Madani dalam pengertiannya merupakan masyarakat yang agamis, berdaya, sopan santun, beradab dan berbudaya tinggi serta sejahtera dimana masyarakat tersebut dalam menghadapi berbagai permasalahan selalu dihadapi dengan sopan santun dan beradab serta mencari jalan keluar selalu melalui musyawarah. Pilar atau pranata yang harus dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat madani adalah adanya peran ulama atau ahli ilmu yang konsisten, umarah yang mengemban kepemimpinan, pelaku perekonomian masyarakat, pekerja dan rakyat yang loyal.

Misi merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian suatu visi, yang selanjutnya dijadikan sebagai suatu pedoman dalam penyusunan strategi, prioritas kebijakan, penyusunan program dan pengalokasian sumber daya daerah. Untuk maksud tersebut maka misi pembangunan Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - a. Taat melaksanakan dan mengamalkan agama serta menjadi annya landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  - b. Memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan dapat menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan dan perluasan pendidikan dan budaya yang relevan dengan pembangunan daerah.
  - c. Memiliki derajat kesehatan (sehat jasmani dan rohani), memiliki keterampilan kerja dan tingkat kesejahteraan sosial yang memadai, sehingga dapat berperan dalam membangun daerah terutama mendukung pembangunan sektor industri berbasis komoditi perikanan, kelautan, komoditi perkebunan.
  - d. Sumber daya manusia aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat secara profesional, berdaya guna dan produktif.
  - e. Sumber daya manusia masyarakat yang produktif, kreatif, inovatif, berketrampilan.
2. Mempercepat pembangunan ekonomi kerakyatan.
  - a. Adanya landasan ekonomi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berbasis kekuatan ekonomi rakyat, meningkat dan meratanya pendapatan masyarakat dengan memacu pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor industri berbasis komoditi perikanan (komoditi



kelautan) dan komoditi perkebunan, sub-sektor perikanan dan sub-sektor perkebunan.

- b. Meningkatkan pembangunan ekonomi rakyat secara terpadu dan terencana serta menciptakan iklim investasi yang kondusif, guna mendukung percepatan pengembangan industri berbasis komoditi perikanan (komoditi kelautan) dan komoditi perkebunan, sub-sektor perikanan dan sub-sektor perkebunan.
  - c. Tumbuhan dan berkembangnya usaha kecil, menengah, dan koperasi yang didukung pengusaha besar melalui kemitraan yang saling menguntungkan.
  - d. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya daerah secara bijaksana dan terencana guna mendukung pengembangan sektor industri berbasis komoditi perikanan (komoditi kelautan) dan komoditi perkebunan, sub-sektor perikanan dan sub-sektor perkebunan.
3. Meningkatkan sarana, prasarana dan pengembangan wilayah.
- a. Meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana transportasi antar wilayah guna mendukung percepatan upaya pengembangan sektor industri berbasis komoditi perikanan (komoditi kelautan) dan komoditi perkebunan, sub-sektor perikanan dan sub-sektor perkebunan.
  - b. Meningkatkan pengembangan potensi wilayah melalui pengembangan ekonomi wilayah, pengembangan wilayah strategis, pembangunan pedesaan dan perkotaan, pengembangan perumahan/pemukiman, pengembangan wilayah tertinggal, serta penataan ruang dan pengelolaan

pertanahan berdasarkan konsep keseimbangan spasial dan berwawasan lingkungan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar daerah.

## **IV.2. Profil DPRD Kabupaten Natuna**

### **1V.2.1. Kedudukan DPRD**

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Adapun konfigurasi DPRD Kabupaten Natuna terdiri dari Anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang berjumlah 20 orang dan anggota DPRD berdomisili di Ranai Ibukota Kabupaten Natuna.

DPRD Kabupaten Natuna memiliki fungsi, diantaranya:

- a. Fungsi Legislasi;
- b. Fungsi Anggaran;
- c. Fungsi Pengawasan.

### **IV.2.2. Tugas dan Wewenang DPRD**

Adapun tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Natuna sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Natuna Nomor KPTS.14/DPRD/2007 pasal 72 yaitu:

- a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Kepala Daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Keputusan Kepala Daerah,

APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama Internasional di daerah

- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
- f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi;
- g. tugas-tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

#### **IV.2.3. Hak dan Kewajiban DPRD**

##### **IV.2.3.1. Hak DPRD**

Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa DPRD mempunyai hak, diantaranya:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Selain itu, anggota DPRD juga memiliki hak diantaranya:

- a. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;

- f. imunitas;
- g. protokoler;
- h. keuangan dan administratif.

#### **IV.2.3.2. Kewajiban DPRD**

Mengenai kewajiban anggota DPRD Kabupaten Natuna, diantaranya:

- a. mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- h. memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggungjawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya;
- i. menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;
- j. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

#### **IV.2.4. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Natuna**

Untuk merealisasikan fungsi, tugas dan wewenang, hak DPRD dan hak anggota DPRD, kewajiban anggota, maka dibantu dengan berbagai alat kelengkapan dan pendukung, seperti yang diatur dalam Pasal 98 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2003, yang selanjutnya dimuat dalam pasal 46 UU Nomor 32 Tahun 2004, serta lebih khusus dalam pasal 21 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Natuna Nomor KPTS.14/DPRD/2007, terdiri atas:

##### **IV.2.4.1. Pimpinan**

Pimpinan DPRD Kabupaten Natuna terdiri atas satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih oleh Anggota DPRD dalam Sidang Paripurna.

Pimpinan DPRD mempunyai tugas:

- a. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
- c. menjadi juru bicara DPRD;
- d. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
- e. mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
- f. mewakili DPRD dan alat kelengkapan DPRD dipengadilan;
- g. melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD.

Demi memudahkan dan juga untuk mencapai efisiensi dan efektifitas kinerja Pimpinan DPRD, maka diantara pimpinan diadakan pembagian tugas sebagai berikut:

- a. Ketua dan Wakil Ketua DPRD memimpin kegiatan DPRD sehari-hari;
- b. wakil-wakil ketua membantu ketua dalam menyelenggarakan kegiatan DPRD;
- c. ketua dan wakil ketua dapat menghadiri rapat-rapat komisi;
- d. apabila ketua berhalangan hadir, maka tugas kewajibannya dilakukan oleh wakil ketua yang ditunjuk oleh ketua, dan ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD;
- e. apabila ketua dan wakil ketua berhalangan tetap, rapat-rapat DPRD untuk sementara waktu dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD yang terdiri atas seorang Ketua dan Seorang Wakil Ketua yang berasal dari 2 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD sampai terpilihnya Pimpinan DPRD baru.

#### **IV.2.4.2. Panitia Musyawarah**

Panitia Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD, pada permulaan masa jabatan keanggotaannya. Panitia Musyawarah terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Keanggotaan Panitia Musyawarah dibentuk sedemikian rupa sehingga

mencerminkan semua unsur-unsur fraksi dan komisi yang ada dalam DPRD. Ketua DPRD dan Para Wakil Ketua adalah *ex officio* anggota merangkap Ketua dan Wakil Ketua Panitia Musyawarah. Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Panitia Musyawarah mempunyai tugas:

- a. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD, diminta atau tidak diminta;
- b. menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD;
- c. memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
- d. memberikan saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- e. merekomendasi pembentukan panitia khusus.

Selain itu, setiap anggota Panitia Musyawarah wajib:

- a. Mengadakan konsultasi dengan Fraksi-fraksi sebelum mengikuti rapat Panitia Musyawarah.
- b. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Panitia Musyawarah kepada Fraksi.

#### **IV.2.4.3. Komisi**

Komisi merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan melakukan kegiatan. Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu Komisi. Keanggotaan DPRD dalam komisi diusulkan oleh Fraksi.

Jumlah Komisi pada DPRD Kabupaten Natuna dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

**Tabel IV.2. Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Natuna**

No	Nama komisi	Ruang Lingkup	Nama anggota	Jabatan Dalam Komisi
1.	Komisi I	Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Welmi A.Md Raja Mazruni Baharuddin, S.pd Dra. Hj Ngusti Yuni Suprapti, M.A	Ketua Wk.Ketua Sekretaris Anggota Anggota
2	Komisi II	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Abil Hanapi, S.Sos Dwita Gunawan, Sp H Nuzur, ST Asfandi Rumaiddi Joharis Ibro	Ketua Wk.Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
3.	Komisi III	Bidang Keuangan	Mustamin, S.Sos Drs. H. M. Yunus Dip.Ling.M.Si Alias Kadir, SE Zulkarnain Sunaryo H.Harmain Usman	Ketua Wk.Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota

*Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2011*

Komisi-komisi dalam DPRD Kabupaten Natuna terdiri dari:

- a. Komisi I, Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat yang meliputi: pemerintahan, ketertiban, keamanan, kependudukan, penerangan/pers, hukum/perundang-undangan, perizinan, pertahanan, kepegawaian/aparatur, sosial politik dan organisasi masyarakat, pertahanan, agama, pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, ketenagakerjaan, kepemudaan, olahraga dan sosial.
- b. Komisi II, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, meliputi : perindustriaan, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan, logistik, koperasi, pariwisata, dunia usaha dan penanaman modal, pekerjaan umum, tata kota, pertamanan, kebersihan,



perhubungan, pertambangan dan energi, perumahan rakyat dan lingkungan hidup.

- c. Komisi III, Bidang Keuangan, meliputi : keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan patungan dan sumbangan pihak ketiga dan BUMD.

Komisi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
- b. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing;
- d. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan Masyarakat kepada DPRD;
- e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- g. melakukan kunjungan kerja/studi banding Komisi atau gabungan Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- h. mengadakan rapat kerja dan dengan pendapat;
- i. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;
- j. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

#### IV.2.4.4. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan secara fungsional dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD. Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna harus segera membentuk alat kelengkapan DPRD berupa Badan Kehormatan.

Jumlah dan komposisi pimpinan dan keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Natuna masa jabatan 2009-2014, dapat dilihat dalam daftar tabel IV.2 sebagai berikut:

**Tabel IV.3 Komposisi Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Natuna Masa Jabatan 2009-2014**

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	Dra. Hj Ngusti Yuni	Ketua	Golkar Plus
2.	Abil Hanapi, S.Sos	Wk. Ketua	PAN
3.	Zulkarnain	Anggota	PDI-P
4.	Sekretaris Dewan	Karena Jabatannya dalam kedudukan adalah sebagai Sekretaris Badan Kehormatan DPRD Kab. Natuna.	

*Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2011*

Adapun tugas dan fungsi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Natuna Masa Jabatan 2009-2014, diantaranya:

- a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan, Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD;

- c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih;
- d. menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD dan merekomendasikan untuk pemberhentian Anggota DPRD Antar Waktu sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- e. menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD, rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.

#### **IV.2.4.5. Panitia Anggaran**

Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Natuna terdiri atas Pimpinan DPRD, satu wakil dari setiap Komisi dan utusan dari Fraksi yang berdasarkan pertimbangan dari jumlah Anggota yang berjumlah 20 orang.

Adapun tugas Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Masa Jabatan 2009-2014, diantaranya:

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. memberikan saran dan pendapat kepada dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna;

- c. memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Pra Rencana APBD, Rancangan APBD baik penetapan, perubahan dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Bupati;
- d. memberikan saran dan pendapat terhadap Rancangan Perhitungan Anggaran yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD;
- e. menyusun Anggaran Belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD.

Komposisi keanggotaan panitia anggaran DPRD Kabupaten Natuna masa jabatan 2009-2014, dapat dilihat dalam daftar tabel berikut:

**Tabel IV.4. Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Natuna Masa Jabatan 2009-2014**

No	Nama Anggota	Jabatan
1.	Hadi Candra, S.sos	Ketua merangkap anggota
2.	Daeng Amhar, SE.MM	Wk. Ketua merangkap Anggota
3.	Abdul Haris, S.H	Wk. Ketua merangkap Anggota
4.	Daeng Amhar, S.E, MM	Anggota
5.	H. Nuzur, S.T	Anggota
6.	Mustamin Bakri, S.Sos	Anggota
7.	H. Wahyudi	Anggota
8.	Baharuddin	Anggota
9.	Zulkarnain	Anggota
10.	Asmirwan	Anggota
11.	Drs. H. Zukhrin	Anggota

*Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2011*

#### **IV.2.4.6. Panitia Legislasi**

Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah maka dibentuk Panitia Legislasi yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD. Panitia Legislasi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara. Jumlah Anggota Panitia Legislasi mempertimbangkan dari jumlah Anggota Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran. Susunan

keanggotaan, organisasi dan tata kerja Panitia Legislasi ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Legislasi dibantu oleh Sekretaris yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.

Adapun tugas Panitia Legislasi DPRD Kabupaten Natuna Masa Jabatan 2009-2014, diantaranya:

- a. Mengkoordinasikan program legislasi daerah yang merupakan usul DPRD dengan program legislasi daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- b. menentukan prioritas Rancangan Peraturan Daerah yang harus dilaksanakan;
- c. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan usul DPRD;
- d. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah;
- e. melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah.

Komposisi pimpinan dan keanggotaan panitia legislatif DPRD Kabupaten Natuna masa jabatan 2009-2014, dapat dilihat dalam daftar tabel berikut:

**Tabel IV. Komposisi Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislas DPRD Kabupaten Natuna**

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari Komisi
1.	Drs. Tarmizi	Ketua	Komisi III
2.	H. Ibnu Hajar, S.Sos	Wk. Ketua	Komisi II
3.	Amat Yani	Sekretaris	Komisi III
4.	Yurnaidi, S.Sos	Anggota	Komisi II
5.	Sabani, S.H	Anggota	Komisi I
6.	Nurbita Trihadi	Anggota	Komisi II
7.	H. Abu Bakar Matrang	Anggota	Komisi III
8.	H. Mohd. Isa Usman	Anggota	Komisi II
9.	H. Sayed Nong Ali	Anggota	Komisi I

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2011

#### **IV.2.4.7. Alat Kelengkapan Lain Lain yang Dibutuhkan**

Selain alat kelengkapan yang telah saya uraikan diatas, ternyata DPRD Kabupaten Natuna dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan, berupa Panitia Khusus dan Tim. Kedua alat kelengkapan tersebut tidak tetap atau bersifat sementara apabila diperlukan. Panitia Khusus dan Tim terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua dan satu orang sekretaris yang dipilih oleh Anggota DPRD setelah mendengar pendapat dan pertimbangan dalam rapat Panitia Musyawarah dengan persetujuan melalui Rapat Paripurna.

#### **IV.2.4.8. Kedudukan, Susunan dan Tugas Fraksi-Fraksi**

Fraksi merupakan pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan partai atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.

Fraksi memiliki tugas:

- a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan masing-masing;
- b. meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna para anggotanya dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD;
- c. menyampaikan Pandangan Umum Anggota dan kata akhir Fraksi pada setiap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- d. menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Komposisi Fraksi-fraksi dalam kelembagaan DPRD Kabupaten Natuna dapat dilihat dalam table berikut ini:

**Tabel IV.6. Komposisi Fraksi-Fraksi Dalam Kelembagaan DPRD Kabupaten Natuna Periode 2009-2014**

No	Fraksi	Jumlah Anggota
1.	Fraksi Golkar Plus	6
2.	Fraksi PAN	4
3.	Fraksi Demokrat	2
4.	Fraksi PDI Perjuangan	3
5.	Fraksi Gabungan	5

*Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2011*

### **IV.3. Identitas Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2009-2014**

#### **IV.3.1 . Anggota DPRD Kabupaten Natuna Berdasarkan Latar Belakang Tingkat Pendidikan.**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD yang cukup kompleks, diperlukan kemampuan menyelesaikan suatu permasalahan dan kemampuan membuat kebijakan yang berkualitas. Anggota DPRD tidak cukup hanya memiliki persyaratan politis, tetapi juga memiliki persyaratan formal dan intelektual serta pengetahuan praktis tentang pemerintah daerah.

Dari segi tingkat pendidikan, anggota DPRD Kabupaten Natuna cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari tabel II.6 berikut ini:

**Tabel IV.7. Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2004-2009 Berdasarkan Latar Belakang Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	SMU Sederajat	9	45%
2.	Diploma	1	5 %
3.	S1	8	40%
4.	S2	2	10 %
Jumlah		20	100 %

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan DPRD Kabupaten Natuna Tahun 20011*

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Natuna periode 2009-2014, yang paling tinggi adalah tamatan

perguruan tinggi sebanyak 10 orang atau 50%, sedangkan tingkatan pendidikan yang paling rendah adalah tamatan Sekolah Menengah Umum atau sederajat.

#### **IV.3.2. Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2009-2014 Berdasarkan Tingkat Usia**

Anggota DPRD Kabupaten Natuna jika dilihat dari tingkat usia, berkisar antara 35-69 tahun. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel IV.8. Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2009-2014 Berdasarkan Tingkat Usia**

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1.	35-39 Tahun	6	30 %
2.	40-49 Tahun	8	40 %
3.	50-59 Tahun	4	10 %
4.	60-69 Tahun	2	10 %
Jumlah		20	100 %

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2011*

#### **IV.3.3 Anggota DPRD Kabupaten Natuna Berdasarkan Jenis Kelamin**

Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2009-2014 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel IV.9. Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2009-2014 Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	19	95
2.	Perempuan	1	5
Jumlah		20	100

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2011*



## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **V.1. Identitas Responden**

Sebelum dilakukan pembahasan terhadap hasil penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan identitas responden guna mendapatkan informasi yang akurat dalam menganalisa data yang akhirnya dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya. Adapun identitas responden yang diidentifikasi sebagai berikut :

##### **V.1.1 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Melalui pendidikan yang dilakukan secara sadar dan berencana serta berkesinambungan akan membentuk serta mengembangkan kepribadian dan kemampuan seseorang. Pendidikan yang pernah dimiliki seseorang cenderung mempengaruhi kepribadian, kemampuan, wawasan dan pola pikir seseorang.

Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula keahlian, daya pikir dan wawasan yang dimilikinya. Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.1.. Jumlah Responden Penelitian yang mengisi quisioner berdasarkan tingkat pendidikan.**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1.	Tidak Tamat SD	-	-
2.	Tamat SD	-	-
3.	Tamat SLTP	5	9,6 %
4.	Tamat SLTA	12	23,1 %
5.	Tamat Akademi	2	3,8 %
6.	Tamat Perguruan Tinggi	33	63,5 %
	<b>Jumlah</b>	<b>52</b>	<b>100 %</b>

*Sumbe : Data Olahan, 2011*

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden yang paling tinggi adalah tamatan tamatan Perguruan Tinggi yakni 33 orang atau 63,5 % sedangkan yang paling rendah adalah Tamat (SLTP) yakni 5 orang atau 9,6 %. Dengan demikian semakin baiknya tingkat pendidikan responden, diharapkan jawaban-jawaban yang diberikan akan lebih rasional dan objektif.

#### **V.1.2. Responden Berdasarkan Tingkat Umur**

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan berfikir seseorang dan juga menentukan pengalaman kerja seseorang dalam menentukan hal apa yang semestinya dilakukan dalam hidupnya, semakin dewasa seseorang maka pikiran dan tindakannya cenderung pula dapat dipertanggungjawabkan. Untuk lebih jelasnya tingkat umur responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.2. Jumlah Responden Penelitian masyarakat yang mengisi quisioner berdasarkan tingkat umur**

<b>No</b>	<b>Tingkat Umur (Tahun)</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1.	17 – 25	7	13,5 %
2.	26 – 35	11	21,2 %
3.	36 – 49	26	50 %
4.	> 50	8	15,3 %
	<b>Jumlah</b>	<b>52</b>	<b>100,00 %</b>

*Sumber: Data Olahan, 2011*

Dari data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kebanyakan dari responden berumur antara 36 – 49 tahun yakni 26 orang atau 50 % sedangkan yang paling sedikit adalah berumur antara 17-25 tahun yakni 7 orang atau 13,5 %.

Dari data tabel diatas terlihat masing-masing kelompok responden tersebut sudah dikatakan dewasa dalam menentukan suatu keputusan sehingga dalam mengambil keputusan responden tidak lagi mudah dipengaruhi orang lain dan secara kejiwaan mempunyai kematangan emosi sehingga setiap informasi yang diperoleh dari mereka lebih objektif untuk dapat menggambarkan keadaan berdasarkan fakta yang sebenarnya di lapangan.

## **V.2 Analisis Fungsi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna Tahun 2010**

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan rencana sebagian dari perencanaan yang menyeluruh adalah Pengawasan, hal ini dimaksud untuk mengusahakan pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan rencana atau program - program yang telah digariskan. Di Negara Indonesia, sistem pengawasan ini telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983, akan tetapi peraturan hukum tersebut tidak memberikan keterangan yang tegas dan jelas mengenai pengertian pengawasan itu.

Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mampu memberikan gambaran yang jelas terutama tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai target sasaran yang hendak dicapai. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dapat

dirasakan masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan publik.

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar dapat terwujud dengan berhasil dan tertib, maka untuk mencapai tujuan itu harus disertai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban bagi pelaksana dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna yang berperan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010.

Di dalam Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1983 pada Pasal 3 ayat (2) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan melekat adalah pengawasan yang diterapkan DPRD Kabupaten Natuna dalam melaksanakan pengawasan APBD dengan:

1. Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula;
2. Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
3. Melalui perencanaan kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk kerja antar kegiatan tersebut dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapai;
4. Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan.

Adanya pengawasan melekat yang dilakukan pimpinan dewan langsung kepada anggota tidaklah berarti mengganggu pelaksanaan tugas pemeriksaan dari aparat pengawasan, juga tidak menjadi tumpang tindih dalam pemeriksaan. Rasa kekhawatiran kemungkinan akan timbul masalah di atas dapat dicegah karena sasaran maupun ruang lingkup pemeriksaan dari masing-masing aparat pengawasan fungsional dan atasan langsung saling berbeda. Dengan demikian semua bidang dan semua kegiatan dalam pelaksanaan APBD perlu diawasi untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna yang setinggi-tingginya serta untuk mencegah kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan.

Dalam mekanisme pemerintahan di Indonesia dikenal pula pengawasan yang bersifat ekstern. Hal ini terjadi apabila pemerintah diawasi oleh lembaga Negara yang posisinya berada di luar lembaga eksekutif, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. DPRD dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah diberikan fungsi-fungsi implementasi kebijakan publik yang meliputi aspek pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan kepada DPRD diberikan fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kepala Daerah. Jadi dengan demikian diharapkan pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah dan institusi politik dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Salah satu Tugas dan Wewenang DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 adalah melaksanakan pengawasan terhadap :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
2. Pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah;
3. Pelaksanaan APBD;
4. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah; dan
5. Pelaksanaan kerjasama internasional di daerah.

Tugas dan wewenang pengawasan berdasarkan dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) tersebut, harus dibedakan dengan tugas pengawasan yang dilakukan oleh perangkat pengawas fungsional. Tugas dan wewenang pengawasan yang dilakukan DPRD berada dalam dimensi politik, sedangkan tugas pengawasan yang dilakukan perangkat pengawas fungsional berada dalam dimensi administrasi. Hal ini berarti, tugas pengawasan oleh DPRD lebih menekankan pada segi hubungan antara penggunaan kekuasaan oleh eksekutif dengan kondisi kehidupan rakyat di daerah. Maksudnya, apakah rakyat benar-benar telah memperoleh pelayanan dan perlindungan secara semestinya? Apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah benar-benar menjadikan meningkatnya kesejahteraan rakyat? Apakah penggunaan anggaran yang telah dialokasikan tidak disalahgunakan untuk hal yang merugikan rakyat dan negara? Apakah pungutan-pungutan yang diambil dari rakyat telah dibukukan secara benar dan didayagunakan secara optimal bagi kesejahteraan rakyat? Apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak merugikan rakyat? Apakah dengan hutang

kepada negara lain lebih banyak memberi manfaat ketimbang ruginya? dan sebagainya. Jika ternyata dari hasil pengawasan diperoleh indikasi adanya kecenderungan yang negative atau merugikan kepentingan rakyat dan negara, DPRD berwenang menanyakan dan menyatakan keberatannya kepada Pemerintah Daerah. DPRD boleh meminta Kepala Daerah untuk menunda atau bahkan mencabut kebijakannya jika benar-benar merugikan rakyat banyak. Bahkan jika berkategori pelanggaran terhadap hukum, DPRD sewaktu-waktu dapat menindaklanjuti dengan meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah.

### **V.2.1 Fungsi Perencanaan Pengawasan APBD Kabupaten Natuna**

Untuk mengetahui kapasitas dari perencanaan Pengawasan APBD yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Natuna selama tahun 2010, maka disini penulis akan melakukan pembahasan dan penelaahan terhadap Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Natuna Tahun 2010. Berikut ini adalah tabel mengenai pengukuran tingkat Pengawasan DPRD Kabupaten Natuna tahun 2010 dengan memberikan kuosioner yang diajukan kepada responden dengan pertanyaannya adalah:

**Tabel V.2.3. Apakah pengawasan DPRD terhadap Perencanaan pendapatan Daerah sudah berjalan dengan baik.**

<b>NO</b>	<b>Alternatif Jawaban Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Baik	17	32,7 %
2	Cukup baik	30	57,7 %
3	Tidak baik	5	9,6%
<b>Jumlah</b>		<b>52</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tanggapan responden diatas tentang pengawasan terhadap perencanaan pendapatan daerah, maka dapat dikatagorikan cukup baik. Karena dari 52 orang responden yang menyatakan cukup baik adalah 30 orang atau 57,7 %.

Dari jawaban responden diatas jelaslah bahwa pengawasan terhadap perencanaan pendapatan daerah cukup baik hal ini bisa dilihat dari besaran APBD Kabupaten Natuna pada tahun 2010, yang pada dasarnya jika dilihat mampu membawa Kabupaten Natuna bersaing dengan Kabupaten lainnya yang ada di Indonesia, selain itu dengan membaiknya perencanaan pendapatan daerah di harapkan bisa menambah pengembangan sektor perekonomian rakyat khususnya Kabupaten Natuna, hal inilah yang di harapkan masyarakat pada umumnya dari membaiknya perencanaan Anggaran maka akan adanya pemerataan pembangunan.

**Tabel V.2.4 Apakah pengawasan DPRD terhadap perencanaan usulan belanja rutin Daerah sudah berjalan dengan baik.**

<b>NO</b>	<b>Alternatif Jawaban Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Baik	25	48,1 %
2	Cukup baik	20	38,4 %
3	tidak baik	7	13,5 %
<b>Jumlah</b>		<b>52</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tanggapan responden diatas tentang pengawasan terhadap perencanaan usulan belanja rutin Daerah, maka dapat dikatagorikan baik. Karena dari 52 orang responden yang menyatakan baik adalah 25 orang atau 48,1 %.



Dalam pengesahan APBD 2010 tidak ada mengalami perubahan yang signifikan bahkan peningkatan angka dalam mencapai Rp8 M dari perencanaan sebelumnya Rp 843 M menjadi Rp 850 M. Selanjutnya pengesahan APBD Perubahan sebesar Rp 1,11 Trilyun maka terungkap bahwa total dana berasal dari APBD murni sebesar Rp 835,28 Miliar dan tambahan setelah perubahan sebesar Rp 280,45 Miliar. Dana perubahan tersebut diperuntukkan bagi penambahan belanja tidak langsung SKPD yang meliputi: subsidi listrik, belanja hibah, belanja bantuan keuangan kepada desa/kelurahan serta bantuan lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

**Tabel V.2.5. Apakah pengawasan DPRD terhadap perencanaan pembangunan daerah telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat**

NO	Alternatif Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sesuai	11	21,2 %
2	Cukup sesuai	27	51,9 %
3	tidak sesuai	14	26,9 %
<b>Jumlah</b>		<b>52</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tanggapan responden diatas terhadap perencanaan pembangunan daerah, maka dapat dikategorikan cukup sesuai, karena dari 52 orang responden yang menyatakan cukup sesuai adalah 27 orang atau 51,9 %.

Tanggapan responden menyatakan sesuai namun masih terdapat juga Permasalahan Pembangunan Daerah yang terjadi di Kabupaten Natuna bisa diakibatkan oleh Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga Listrik, Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum,

Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur.

Hal tersebut diatas adalah fenomena yang benar-benar terjadi di Kabupaten Natuna seperti transportasi yang tidak memadai baik laut dan udara, transportasi laut dan udara yang minim ke wilayah natuna di karenakan jauhnya daya jangkau, untuk angkutan laut fenomena yang terjadi hanya seminggu sekali adanya kapal sandar, sedangkan udara hanya seminggu tiga kali itu pun dengan jadwal yang tidak tentu, listrik, air bersih dan sebagainya termasuk pemeliharaan terhadap fasilitas umum, pemasalahan semacam ini telah terjadi setiap tahunnya namun pembenahannya kurang terwakilkan melalui perencanaan pembangunan . Sebagai mana wawancara penulis dengan beberapa narasumber diantaranya salah seorang Anggota DPRD dari Komisi III Mustamin Bakri, S.Sos mengenai pemeliharaan bangunan yaitu masalah jembatan yang hampir rubuh apakah tidak adanya perbaikan, serta mengutip sumber dari Detik Kepri yang mewawancarai Sekjen Lsm. Gerbang Utara, Ridwan CH, mengenai air bersih.

“ Tentang jembatan dan pelabuhan singgah yang ada di desa semedang itu sudah kita ketahui bahwasanya terbuat dari kayu, dan sebenarnya pada tahun 2010 kemarin telah di Anggarkan namun karna permasalahan yang dikarenakan adanya keterlambatan yang terjadi yaitu permasalan keterlambatan yang dilakukan oleh Dinas PU dan waktu pembangunannya diperkirakan tidak bisa rampung maka di tunda pada tahun 2011 dan Anggarannya kembali kepada kas daerah. Ini sangat disayangkan karna bisa menghambat pertumbuhan perekonomian masyarakat” (Wawancara dengan Mustamin Bakri, S. Sos, tanggal 08 September 2011).

“Air merupakan kebutuhan manusia namun belum dinikmati sebagian besar warga Natuna, Pemda dan DPRD dpat mencari jalan keluar untuk menyikapi permasalahan suplay air di Natuna yang selama ini masih tersendat. Desakan tersebut perlu disampaikan agar ada dasar hukum bagi Pemkada untuk menyertakan modal ke PDAM sebagai modal pembenahan sistim pengolahan sumber air Sebaiknya Ranperda PDAM ini dibahas tahun 2010 ini juga karena

tahun 2009 sebelumnya tertunda,” kata Sekjen Lsm. Gerbang Utara, Ridwan CH, kepada detikkepri.com, Sabtu 13 Maret 2010).

Jika dilihat Kegagalan Perencanaan pembangunan yang selama ini terjadi di kabupatennatuna diakibatkan oleh:

1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:
  - a. informasinya kurang lengkap,
  - b. metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana
  - c. pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
  - a. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.
  - b. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
  - c. masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.

**Tabel V.2.6. Apakah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna sudah berjalan dengan baik;**

NO	Alternatif Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Baik	13	25%
2	Cukup baik	21	40,4 %
3	Tidak baik	18	34,6 %
<b>Jumlah</b>		<b>52</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tanggapan responden diatas tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka dapat dikatagorikan Cukup baik Karena dari 52 orang responden yang menyatakan cukup baik adalah 21 orang atau 40,4 %.

Dari tanggapan responden bisa disimpulkan bahwasannya perhitungan anggaran yang di ajukan kepada DPRD oleh Pemerintah Daerah cukup baik karna jika disahkan oleh DPRD sesuai dengan apa yang dihitung maka anggaran yang di ajukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan maka akan memudahkan pelaksanaan setiap kegiatan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah

Selanjutnya Perhitungan anggaran daerah (perhitungan APBD) adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah atas seluruh pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD. APBD di satu pihak menggambarkan perhitungan atas perkiraan dan realisasi pengeluaran, dan dipihak lain menggambarkan perhitungan atas perkiraan dan realisasi Pendapatan daerah dalam membiayai program dan kegiatan daerah pada satu anggaran tertentu.

**Tabel V.2.7. Apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan perencanaan pengawasan terhadap penyusunan APBD Kabupaten Natuna dengan baik;**

<b>NO</b>	<b>Alternatif Jawaban Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Baik	2	3,9%
2	Cukup baik	27	51,9%
3	tidak baik	23	44,2%
<b>Jumlah</b>		<b>52</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tanggapan responden diatas tentang perencanaan pengawasan terhadap penyusunan APBD, maka dapat dikatagorikan cukup baik. Karena dari 52 orang responden yang menyatakan cukup baik adalah 27 orang atau 51,9%.

Jika dilihat lapangan proses penyusunan dan penetapan APBD, maka muncul pertanyaan, siapa yang mengerjakan apa, dalam hal ini permasalahan yang muncul dalam penyusunan APBD di Kabupaten Natuna adalah adanya kepentingan kelompok dalam penyusunan dan penetapan APBD yang disebabkan oleh posisi Anggota DPRD yang merupakan refresentasi perwakilan partai politik dari daerah pemilihan ( wilayah kecamatan ) yang mempunyai kepentingan yang berbeda, dalam kepentingan daerah pemilihannya, alih-alih ingin berbakti kepada masyarakat didaerah pemilihan maka mengorbankan kepentingan masyarakat umum kondisi ini terjadi sangat jelas karna jumlah porsi anggota yang berbeda maka bisa dilakukan interpersi sebagai contoh menumpuknya pembangunan di wilayah tertentu dan tidak adanya pemerataan sesuai kebutuhan, sehingga adanya pembangunan di daerah lain tidak terlaksana dan dimasukkan pada Anggaran tahun berikutnya.

Dalam kondisi tersebut legislatif tentunya menggunakan daya tekan yang dimilikinya untuk memprioritaskan usulan program dari daerah pemilihannya untuk kepentingan kelompok atau partai yang diwakilinya. Dalam hal lain hal senadapun dilakukan eksekutif sebagai lembaga yang mengusulkan rancangan APBD bisa saja mengabaikan hasil musyawarah perencanaan dan pembangunan yang telah disepakati dengan masyarakat, sehingga hal yang tertuang dalam dokumen rancangan APBD bukan merupakan daftar kebutuhan masyarakat, melainkan daftar keinginan kelompok tertentu.

**Tabel V.2.8 Apakah pelaksanaan pembahasan APBD Kabupaten Natuna sudah berjalan dengan baik.**

NO	Alternatif Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Baik	23	44,2 %
2	Cukup baik	12	23,1 %
3	Tidak baik	17	32,7 %
<b>Jumlah</b>		<b>52</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tanggapan responden diatas tentang pelaksanaan pembahasan APBD, maka dapat dikatagorikan baik. Karena dari 52 orang responden yang menyatakan baik adalah 23 orang atau 44,2 %.

Pembahasan APBD diharapkan dilaksanakan berdasarkan atas kebutuhan masyarakat secara menyeluruh tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain yang membuat pembahasan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selama ini yang terjadi dalam pembahasan APBD adalah DPRD berusaha untuk meningkatkan transparansi dalam pembahasan hal ini diketahui dari semakin banyaknya tokoh pemuda dan tokoh masyarakat yang diikut sertakan dalam pembahasan serta keterbukaan terhadap media, namun selanjutnya di harapkan lebih banyak lagi masyarakat yang diikutkan dalam pembahasan APBD.

**Tabel V.2.9. Apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan perencanaan pengawasan Penetapan APBD Kabupaten Natuna dengan baik;**

NO	Alternatif Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Baik	5	9,6 %
2	Cukup baik	29	55,8 %
3	Tidak baik	18	34,6 %
<b>Jumlah</b>		<b>52</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tanggapan responden diatas menjawab DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan perencanaan pengawasan Penetapan APBD, maka dapat dikatagorikan cukup baik, karena dari 52 orang responden yang menyatakan cukup baik adalah 29 orang atau 55,8 %.

APBD yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada daerah setiap tahunnya bertujuan agar daerah dapat melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan tujuan pemerintah yang telah direncanakan, baik itu pertumbuhan dari segi fisik maupun non fisik, sedangkan yang kenyataan terdapat di daerah diluar dugaan yang terjadi sesuai dengan pendapat responden bahwa penetapan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Natuna tidak seperti yang diharapkan sesuai dengan realita bahwa pembangunan yang ada tidak sesuai dengan anggaran yang dikucurkan salah satu buktinya bahwa daerah belum merencanakan pembangunan yang sesuai sampai saat ini belum adanya batasan wilayah kabupaten.

Penetapan APBD yang dilakukan oleh DPRD harus sesuai dengan rencana kerja daerah, karena anggran tersebut sangat di butuhkan dalam menjalankan rencana kerja pemerintah daerah, jika hal itu tidak terlaksana maka daerah tidak akan pernah mengalami perkembangan yang pesat. Banyak permasalahan-permasalahan yang akan timbul sehingga daerah tersebut akan mengalami keterpurukkan dalam berbagai bidang pembangunan, selain itu terdapat pula lobi-lobi yang dilakukan diluar dari ketentuan yang berlaku sehingga adanya penumpukan pembangunan pada kecamatan tertentu.

### V.2.2 Tahapan Pelaksanaan pengawasan APBD Kabupaten Natuna

Aspek kegiatan penilaian yaitu ukuran-ukuran atau tingkatan penilaian yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Natuna terkait pengawasan terhadap pelaksanaan Pengawasan APBD tahun 2010. Baik penilaian yang disimpulkan dalam laporan Komisi, pandangan fraksi, kemudian keputusan DPRD serta penilaian selama masa pelaksanaan anggaran dalam agenda-agenda DPRD, selanjutnya dinilai apakah layak atau tidaknya pelaksanaan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah.

Berikut ini adalah tabel mengenai pengukuran tingkat fungsi pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh DPRD anggaran tahun 2010 pada Tahapan Pelaksanaan pengawasan, dengan memberikan kuosioner yang diajukan kepada responden dengan pertanyaannya adalah:

**Tabel V.2.10 Apakah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna sudah tertata dengan baik.**

No	Alternatif Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Baik	21	40,4 %
2	Cukup baik	15	28,8 %
3	Tidak baik	16	30,8 %
<b>Jumlah</b>		<b>52</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tanggapan responden diatas terhadap Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Natuna dapat dikagorikan baik, karena dari 52 orang responden yang menyatakan baik adalah 21 orang atau 40,4 %.

Pandangan responden ini merupakan tolak ukur peneliti dalam menganalisa permasalahan yang ada, jika dilihat dari segi fisik Alat kelengkapan



DPRD yang ada Begitu menyakinkan untuk melakukan setiap tindakan pengawasan APBD akan tetapi, bisa saja hal ini berupa ketersediaannya saja namun didalam pelaksanaannya tidak terorganisir dengan sebagaimana mestinya dan bisa saja pemanfaatan alat kelengkapan tersebut terkendala, tentang Alat kelengkapan Dewan ini dikuatkan oleh wawancara penulis dengan Kepala Bagian Naskah dan Dokumentasi DPRD Kabupaten Natuna.

”Di DPRD Kabupaten Natuna mengenai alat kelengkapan Dewan sudah sangat sesuai porsi dan ketentuan yang berlaku oleh karena itu semestinya didalam melaksanakan tugasnya tidak akan terdapat kendala yang berarti karena bisa memakai setiap fungsi-fungsi yang melekat pada Alat-alat kelengkapan tersebut, namun kendala dilapangan yang terjadi bisa didasari dari Kemauan dan kemampuan alat kelengkapan DPRD untuk mempelajari secara mendalam dan menyeluruh tentang *budget policy* yang menjadi tugas pokoknya dalam penganggaran masih relatif rendah dan belum merata. Alat kelengkapan yang dimaksud adalah Alat kelengkapan DPRD yaitu: pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, Badan Kehormatan alat dan kelengkapan lain yang diperlukan. Dalam Pengawasan dilakukan melalui alat-alat kelengkapan DPRD antara lain : Rapat dengar pendapat, Rapat kerja, Rapat pembahasan dalam Pansus, Pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna, dan Kunjungan kerja.” (Wawancara dengan Hendra Kusuma, SH. M. Si tanggal 25 september 2011)

**Tabel V.2.11. Apakah Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA).**

NO	Alternatif Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
2	sesuai	9	17,3 %
3	Cukup sesuai	24	46,2 %
5	Tidak sesuai	19	36,5 %
<b>Jumlah</b>		<b>52</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tanggapan responden diatas terhadap Pengawasan pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA), maka dapat dikatagorikan

cukup sesuai, karena dari 52 orang responden yang menyatakan cukup sesuai adalah 24 orang atau 46,2 %.

Pendapat responden cukup sesuai dengan keadaan yang terjadi dilapangan dan itu berdasarkan pengamatan mereka bahwa Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten natuna itu cukup sesuai hal ini dilihat dari keadaan dilapangan banyaknya atau adanya beberapa program pembangunan yang tidak terlaksana dan tertuda pada tahun anggaran yang akan datang.

**Tabel V.2.12. Apakah DPRD Kabupaten Natuna telah melakukan pengawasan terhadap pembangunan fisik dengan baik.**

NO	Alternatif Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Baik	11	21,1 %
2	Cukup baik	16	30,8 %
3	Tidak baik	25	48,1 %
<b>Jumlah</b>		<b>52</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tanggapan responden diatas tentang pengawasan terhadap pembangunan fisik, maka dapat dikategorikan tidak baik. Karena dari 52 orang responden yang menyatakan tidak baik adalah 25 orang atau 48, 1%.

Pembangunan fisik dalam pengerjaan dan tujuan pemanfaatannya haruslah bisa mewakili setiap keinginan aspirasi masyarakat yang semuanya harus diperhitungkan kualitas dari bangunan yang dibuat dan efektif dalam pengerjaan nah semua ini pengawasannya setidaknya ada hak dari DPRD untuk mengawasi pengerjaannya. Namun sifatnya DPRD hanyalah sebagai mitra melihat adanya kesalahan dan menegur lalu sebagai mitra eksekutif haruslah mencari solusi bukan

memfonis, hal ini seperti wawancara penulis kepada kepala badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

”DPRD sejatinya adalah mitra PEMDA dalam membangun daerah mereka mengawasi setiap kegiatan yang pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang melibatkan APBD baik itu bangunan fisik dan sebagainya, sebagai mitra mereka berhak tau baik itu pembangunan sebelum pengerjaan, proses, bahkan saat penyelesaian. Selain pemerintah daerah pun melakukan pertanggungjawaban, namun pada praktik lapangan laporan hanya formalitas, dan dalam pengawasan mereka seolah-olah bekerja bukan sebagai mitra yang menegur dan duduk bersama mencari solusi namun sifatnya memvonis jika ada kesalahan yang terjadi dan melimpahkan kesalahan yang ada kepada pelaksana proyek dan pengelola (PEMDA)” (Wawancara dengan Yusrizal, SH tanggal 19 Agustus 2011).

**Tabel V.2.13 Apakah DPRD telah Mendengarkan laporan masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Natuna dengan baik.**

NO	Alternatif Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	baik	6	11,5 %
2	Cukup baik	27	51,9 %
3	Tidak baik	19	36,6 %
<b>Jumlah</b>		<b>52</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tanggapan responden diatas tentang DPRD telah Mendengarkan laporan masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan, maka dapat dikatagorikan cukup baik. Karena dari 52 orang responden yang menyatakan cukup baik adalah 27 orang atau 51,9 %.

Kegiatan mendengarkan laporan masyarakat biasanya juga disebut masa reses yang intinya mendengar keluhan masyarakat dan apa yang dibutuhkan masyarakat daerah pemilihan masing-masing Anggota DPRD baik itu berupa laporan kekecewaan masyarakat terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun terhadap apa yang ingin dibangun kedepannya. Selanjutnya akan dibahas atau dilakukan tindakan. Namun selama ini yang terjadi

adalah banyaknya laporan masyarakat yang kurang mendapatkan perhatian sehingga ada kerugian tersendiri dari masyarakat.

### V.2.3 Tahap Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah

Pada setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatannya, kepala Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). LKPJ merupakan laporan yang disampaikan oleh kepala daerah setiap tahun dalam sidang Paripurna DPRD yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas otonomi. Pada saat tersebut, DPRD harus memberikan penilaian terhadap kinerja Kepala Daerah dalam melaksanakan pembangunan yang telah diamanahkan

Berikut ini adalah tabel mengenai pengukuran tingkat fungsi pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh DPRD anggaran tahun 2010 pada Tahap Pertanggung Jawaban, dengan memberikan kuosioner yang diajukan kepada responden dengan pertanyaannya adalah:

**Tabel V.2.14 Apakah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah sesuai.**

NO	Alternatif Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
2	sesuai	15	28,8 %
3	Cukup sesuai	16	30,8 %
5	Tidak Sesuai	21	40,4 %
<b>Jumlah</b>		<b>52</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Dari tanggapan responden diatas terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah, maka dapat dikategorikan Tidak sesuai, karena dari 52 orang responden yang menyatakan Tidak sesuai adalah 21 orang atau 40,4 %,

Dari tanggapan responden diatas sedikit bisa mencerminkan bahwasanya adanya kejanggalan LKPJ yang dilakukan pemerintah daerah, hal ini bisa dilihat dari laporan realisasi anggaran yang ada didalam realisasi anggaran bahwasanya seluruh kegiatan yang direncanakan dalam PERDA telah rampung dikerjakan namun kendala yang terjadi dilapangan bahwa ada beberapa pembangunan yang telah dirancang pemerintah daerah tidak bisa dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran namun hal ini tidak di masukkan, program yang terbengkalai itu diantaranya adalah pelabuhan singgah Desa Samedang Kecamatan Bunguran Barat (keterangan dari desa dan Mustamin, S.Sos ketua komisi III) yang tidak bisa direalisasikan yang telah masuk dalam PERDA namun tidak dilaksanakan.

### **V.3 Pembahasan**

Setelah menjelaskan hasil penelitian dari observasi, angket dan wawancara dalam penjelasan di atas, maka berikut ini akan di jelaskan pembahasan tentang hasil rekapitulasi dari keseluruhan penelitian, yaitu sebagai berikut:

**Tabel V.15. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Fungsi Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Oleh Anggota DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2010**

No	Indikator-Indikator	Tanggapan Responden			Jumlah
Perencanaan Pengawasan APBD		B	CB	TB	
1	pengawasan DPRD terhadap Perencanaan pendapatan Daerah sudah berjalan dengan baik	17	30	5	52
2	pengawasan DPRD terhadap perencanaan usulan belanja rutin Daerah sudah berjalan dengan baik	25	20	7	52
3	pengawasan DPRD terhadap perencanaan pembangunan daerah telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat	11	27	14	52
4	Perhitungan APBD Kabupaten Natuna sudah berjalan dengan baik	13	21	18	52
5	DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan perencanaan pengawasan terhadap penyusunan APBD Kabupaten Natuna dengan baik	2	27	23	52
6	pelaksanaan pembahasan APBD Kabupaten Natuna sudah berjalan dengan baik	23	12	17	52
7	Apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan perencanaan pengawasan Penetapan APBD Kabupaten Natuna dengan baik	5	29	14	52
Tahapan Pelaksanaan pengawasan					
8	Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna sudah tertata dengan baik	21	15	16	52
9	Pengawasan Pelaksanaan APBD Kabupaten Natuna sudah sesuai dengan PERDA	9	24	19	52
10	DPRD Kabupaten Natuna telah melakukan pengawasan terhadap pembangunan fisik dengan baik	11	16	25	52
11	DPRD telah Mendengarkan laporan masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Natuna dengan baik	6	27	19	52
Tahap Pertanggung Jawaban					
12	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI) pemerintah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah sesuai	15	16	21	52
	Frekuensi	158	264	202	624
	Persentase	25,3	42,3	32,4	100

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011*

Keterangan :

F : Frekuensi

% : Persentase

Selanjutnya untuk mengetahui hasil tabulasi dalam menilai jawaban responden pada masing-masing pertanyaan dapat dilakukan dengan cara sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Ari Kunto (2003:43) sebagai berikut ini:

Baik (Setuju) :  $3 \times 158 = 474$

Kurang Baik (Kurang Setuju) :  $2 \times 264 = 528$

Tidak Baik (Tidak Setuju) :  $\frac{1 \times 202 = 202 +}{= \frac{1204 \times 100}{1872}} = 64,3\%$

Dari tabel rekapitulasi seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian dapat diketahui bahwa terhadap Fungsi Pengawasan APBD oleh DPRD Kabupaten Natuna tahun Anggaran 2010 maka, dapat dikategorikan, “kurang baik”, karena jumlah responden yang menyatakan kurang baik adalah 64,3%.

DPRD Kabupaten Natuna mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu: fungsi pembuatan kebijakan (legislasi), fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dari tiga fungsi DPRD Kabupaten Natuna yang menjadi perhatian penulis adalah fungsi pengawasan yaitu pengawasan APBD, kenyataan dilapangan bahwa sanya yang paling berhasil dilakukan adalah tentang banyaknya anggota DPRD dan alat-alat kelengkapan Dewan yang adanya sebagai penopang keberhasilan pengawasan.

Fungsi anggaran dan pengawasan dikategorikan belum mampu dijalankan karena, laporan setiap tahunnya kurang jelas dan banyak terjadi penyimpangan,

karna ada pelaporan realisasi berbeda dengan hal yang terjadi dilapangan, anggaran setiap tahunnya tidak sesuai dengan pembangunan yang ada, baik dari segi fisik maupun mental, terjadinya penyalahgunaan anggaran oleh SKPD, adanya PERDA, Peraturan Bupati dan kebijakan Bupati yang tidak berjalan dengan baik.

**V. 3 Upaya-upaya yang dilakukan oleh DPRD untuk meningkatkan fungsi pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010.**

Tujuan pengawasan secara umum itu dijabarkan dengan tahap proses pengelolaan APBD, maka tujuan pengawasan APBD secara terinci adalah:

1. untuk memastikan bahwa APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan rencana strategik dan prioritas program yang telah ditetapkan;
2. untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD benar-benar sesuai dengan anggaran, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan, dan
3. untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang bersangkutan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), selain dengan menggunakan hak-hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti yang telah disebutkan di muka dapat juga dengan menggunakan upaya demi mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi salah satu tugasnya.



Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh DPRD untuk meningkatkan fungsi pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Anggaran tahun 2010 antara lain meliputi:

1. Menyelenggarakan Dengar Pendapat (*Public Hearing*)

Dalam rapat dengar pendapat ini dihadiri antara lain oleh DPRD / Komisi / Panitia khusus dengan perangkat daerah lainnya. Selain itu Pimpinan DPRD dapat pula mengundang Lembaga / Badan / Organisasi Kemasyarakatan seperti LSM, Wartawan dan sebagainya untuk turut hadir mengikuti dengar pendapat dengan kapasitas sebagai pemantau independent. *Publik Hearing* ini dilakukan pada saat akan dibentuknya PERDA, dimaksudkan untuk mengetahui aspirasi lembaga eksekutif dan aspirasi masyarakat tentang masalah yang sedang dibahas sehingga pemerintah perlu membuat PERDA yang dimaksud. Selama tahun 2010 penyelenggaraan *Publik Hearing* dilakukan :

A. Tentang APBD dilakukan sebanyak 3 kali yaitu :

- a. Penyusunan APBD
- b. Perubahan APBD
- c. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD.

B. Pansus – pansus ( Raperda ) :

- a. Perda RPJM ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah )
- b. Perda Penambahan Penyertaan modal Pemkab ke Bank Riau
- c. Perda Perijinan Kesehatan.
- d. Perda Retribusi Kesehatan
- e. Perda Hak Inisiatif Pembiayaan Bank Syariah

- f. Perda PKL ( Pedagang Kaki Lima )
- g. Pernyataan Modal Pemda ke PDAM

## 2. Menggelar Rapat Kerja dengan Eksekutif

Menggelar rapat kerja dengan eksekutif dalam Rapat Komisi dan Rapat Gabungan Komisi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dalam satu tahun. Pengertian rapat komisi ialah rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris Komisi, sedangkan pengertian rapat gabungan komisi ialah rapat gabungan komisis-komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rekapitulasi kegiatan rapat-rapat DPRD Kabupaten Natuna tahun 2010 :

1. Rapat Panitia Musyawarah : 25 kali
2. Rapat Panitia Anggaran : 7 kali
3. Rapat Pimpinan Dewan : 11 kali
4. Rapat Paripurna DPRD : 75 kali
5. Rapat Komisi I : 72 kali
6. Rapat Komisi II : 67 kali
7. Rapat Komisi III : 60 kali
8. Rapat Komisi IV : 61 kali
9. Rapat Badan Kehormatan : 7 kali

Jenis Rapat DPRD terdiri dari :

- a. Rapat Paripurna yaitu merupakan rapat anggota DPRD, dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD, antara lain untuk menyetujui

Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD;

- b. Rapat Paripurna yang bersifat istimewa merupakan rapat anggota DPRD, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu cara tertentu dengan tidak mengambil keputusan;
- c. Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
- d. Rapat Panitia Musyawarah merupakan rapat anggota Panitia Musyawarah, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Musyawarah;
- e. Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi, dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Komisi;
- f. Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat Komisi – komisi yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
- g. Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi dan/atau Pimpinan Fraksi merupakan rapat bersama dipimpin oleh Pimpinan DPRD;
- h. Rapat Panitia Anggaran merupakan rapat anggota Panitia Anggaran, dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Anggaran;
- i. Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan, dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan;

- j. Rapat Kerja merupakan rapat antara DPRD/Panitia Anggaran/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- k. Rapat Dengar Pendapat merupakan rapat antara DPRD/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Lembaga/Badan Organisasi Kemasyarakatan;
- l. Rapat Fraksi merupakan rapat anggota fraksi, dipimpin oleh Ketua Fraksi atau Wakil Ketua Fraksi;
- m. Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus.

### 3. Menggunakan Tenaga Ahli

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004, dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kepala Daerah wajib memberikan izin kepada Tenaga Ahli tersebut dalam hal melakukan pengawasan dan melakukan koordinasi atas aktifitas pengawasan baik mengenai jadwal waktu pemeriksaan maupun dalam hal sasaran yang akan diawasi.

Berdasarkan dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) demi mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna, selanjutnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dituntut

dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan Pengawas untuk mempunyai beberapa kewajiban sebagai berikut:

- a. memiliki kemauan, tekad dan keberanian untuk melakukan pengawasan dan melaksanakan tindak lanjut;
- b. memiliki kesungguhan dan kecermatan melakukan secara nyata kegiatan pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- c. memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengawasan, baik kemampuan manajerial maupun penguasaan teknis tentang kegiatan yang dilaksanakan bawahan.

#### 4. Menyelenggarakan Kunjungan Kerja

Mengenai Kunjungan Kerja bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta kewajiban DPRD, anggota DPRD dapat melakukan Kunjungan Kerja keluar daerah, yang dilakukan sebanyak – banyaknya 2 kali dalam satu tahun anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan. Kunjungan Kerja dimaksudkan untuk melakukan study banding ke beberapa daerah yang dianggap mempunyai prestasi lebih baik sebagai daerah dan program percontohan untuk diadopsi atau terapkan di Kabupaten Natuna lewat anggota DPRD sesuai bidangnya masing – masing dalam komisi. Untuk keperluan ini Sekretariat DPRD menyediakan sarana dan fasilitas. Anggota DPRD dalam lembaga komisi yang terdiri dari beberapa anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja berkewajiban menyampaikan laporannya secara tertulis dan dibacakan dalam forum rapat paripurna selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung dari selesainya kunjungan kerja.

Selama tahun 2010 kunjungan kerja DPRD Kabupaten Natuna dilakukan ke:

- a. Kunjungan DPRD ke Shanghai, Siap Adopsi Teknik Pengolahan Ikan

Ketua DPRD Natuna Hadi Chandra mengaku mendapat banyak pelajaran berharga saat mengunjungi Shanghai China selama lima hari. Salah satunya mereka akan mengadopsi pengolahan ikan yang dilakukan di daerah itu. "Natuna lautnya berbatasan langsung dengan laut China. Untuk itu tak kalah pentingnya jika kita mengadopsi ilmu manajemen perusahaan perikanan di negara tersebut untuk diterapkan di daerah ini" (Haluan Kepri, Jumat 05 November 2010).

- b. Pemda Batam dan Kota Tanjung Pinang

- c. Pemda Kota Pekanbaru dan Batam

##### 5. Mengoptimalkan Masa Reses

Mengenai Reses bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna melakukan masa reses yang tujuannya untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat. Kegiatan ini dimaksudkan juga untuk peninjauan langsung ke lapangan atas sesuatu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, untuk melihat pelaksanaan program itu apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan didalam lembaran kerja pemerintah daerah atau belum sesuai. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya proyek - proyek fiktif yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan para pengusaha nakal.

Dalam tahun 2010 dilakukan Masa Reses 3 Tahap yaitu :

**Tabel V.16. Tahapan dan Rentang Waktu Reses Anggota DPRD**

No	Tahapan	Rentang Waktu
1.	Tahap I	Akhir April-Awal Mei 2010
2.	Tahap II	Akhir Agustus-Awal Spetember 2010
3.	Tahap III	Akhir Desember-Awal Januari 2010

*Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Natun 2011.*

Dengan adanya porogram riset tersebut harapannya adalah agar anggota DPRD bisa berjumpa dan berdiskusi dengan tokoh maupun dengan masyarakat biasa dan menanyakan keluhan yang ada pada masyarakat setempat dan mengusahakan semua keluhan dari masyarakat akan dibahas di DPRD dan berusaha merialisasikannya.

#### **V.4 Faktor penghambat dalam melakukan fungsi pengawasan Anggaran**

##### **Pendapatan dan Belanja Daerah oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010.**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai instrumen dari Pemerintah Daerah adalah wujud dari sistem demokrasi, artinya sebagai representasi politik masyarakat melalui Pemilihan Umum (PEMILU) merupakan wujud nyata dari wakil rakyat. Oleh karena itu keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat penting dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Kepala Daerah.

Kabupaten Natuna merupan daerah yang sangat strategis untuk melakukan perubahan dalam segala bidang, kerena posisinya yang dikelilingi oleh negara-

negara asing. Ditambah lagi dengan anggaran yang dimiliki setiap tahunnya yang begitu besar serta kekayaan alam yang sangat potensi. Natuna jika dikendalikan oleh orang-orang yang bertanggungjawab maka untuk melakukan perubahan dalam segala bidang bukanlah yang sulit. Sampai sekarang di Natuna tidak ada perubahan yang sangat menonjol dari segala bidang.

Adapun faktor-faktor penghambat pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh DPRD Kabupaten Natuna terdiri dari :

a. Keterlambatan Eksekutif.

Faktor penghambat yang datang dari luar lembaga legislatif DPRD Kabupaten Natuna, yaitu keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi APBD dari pihak Pemerintah Daerah kepada DPRD.

Selain itu Pemerintah Kabupaten harus menyampaikan rancangan KUA dan PAS, tepat waktu. Dengan demikian, maka pembahasan APBD Natuna berlangsung lebih cepat dan tepat waktu. penyampaian rancangan KUA dan PAS tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007. Pada pasal 87 aturan tersebut telah dibatasi pengajuan rancangan KUA dan PAS paling lambat Juli tahun anggaran berjalan. Dengan demikian, pembahasan APBD tahun berikutnya dipastikan tidak akan molor dan lambat,” (wakil Komisi II DPRD Natuna, Dwitra Gunawan, S. P)

a. Luasnya wilayah dan Kurangnya Fasilitas.

Kabupaten Natuna terletak di antara 2°LU sampai dengan 5°LU dan dari 104°BT sampai dengan 110°BT, terdiri dari daratan dan perairan dengan luas wilayahnya mencapai 141.901 km<sup>2</sup> dengan luas daratan 3.235,2 km<sup>2</sup> dan lautan



138.666 km<sup>2</sup>. Pada kenyataannya Kabupaten Natuna terdiri dari kepulauan yang kepulauan itu adalah kecamatan yang dalam prakteknya adalah tempat dilaksanakan proyek-proyek yang menggunakan APBD yang memerlukan pengawasan oleh DPRD untuk melakukan pengawasan ke daerah-daerah yang dimaksud memerlukan waktu karna terpisahkan oleh pulau-pulau yang terpisah oleh lautan membutuhkan waktu yang lama hal ini belum termasuk kendala musim yang tidak menentu. Kecamatan yang terpisah dari kabupaten antara lain Kecamatan Midai, Kecamatan Pulau laut, Kecamatan Serasan, Kecamatan Bunguran Barat dan pulau Tiga.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengawas terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Natuna. mengalami keterbatasan fasilitas atau peralatan, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. sehingga kelancaran aktifitas fungsi pengawasan menjadi tidak lancar dan tidak maksimal. Salah satu contoh untuk mengunjungi wilayah kecamatan yang disebutkan diatas membutuhkan transportasi laut sebenarnya ini ada namun tidak memadai.

b. Penumpukan Tugas dari Anggota Dewan

Banyaknya tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD dapat menyebabkan pelaksanaan fungsi pengawasan bukan menjadi prioritas utama bagi sementara anggota DPRD Kabupaten Natuna.

c. Kurangnya kecakapan dan profesionalisme

Kondisi keterbatasan kualitas anggota yang ada pada internal lembaga, artinya kecakapan dan profesionalisme yang dimiliki oleh pada anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih lemah, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan efisien.

DPRD Kabupaten Natuna yang pada dasarnya merupakan tempat keluhan dari berbagai permasalahan yang dialami oleh masyarakat, tapi kenyataannya tidak begitu, mereka yang mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat, malah sebaliknya mereka yang minta dilayani. Ini menunjukkan hal yang tidak pantas dilakukan oleh abdi negara. Jika rasa tanggungjawab dimiliki oleh DPRD maka, kemungkinan apa yang diinginkan oleh masyarakat dapat diaplikasikan dan bahkan mereka tidak sempat untuk memikirkan tentang kebutuhan pribadi mereka karena begitu banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, antara lain:

- a. Masyarakat meminta pengelolaan hasil laut yang maksimal agar perekonomian masyarakat lebih mapan.
- b. Masyarakat meminta sarana transportasi segera di dibangun
- c. Perbaikan rumah warga yang sudah tidak layak dipakai
- d. Penyediaan fasilitas pertanian

Masih banyak lagi keinginan masyarakat yang lainnya yang tidak diaplikasikan. seharusnya seorang pemimpin mampu kecakapan dan profesionalisme, keadaan diatas tidak menunjukkan semua itu.

#### d. Tingkat Pendidikan dan Keilmuan yang Tidak Merata

Pendidikan merupakan suatu proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, pendidikan yang tinggi akan mendatangkan pengetahuan yang luas, dengan

pengetahuan yang luas maka akan lebih maksimal dalam menjalankan semua kegiatan. Pada dasarnya pendidikan harus didapatkan oleh semua kalangan masyarakat agar pembangunan bisa berjalan dengan lancar.

Berdasarkan data yang didapatkan di kantor DPRD Kabupaten Natuna menyatakan bahwa tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Natuna masih kurang memadai, data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V. 17 . Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2009-2014 Berdasarkan Latar Belakang Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	SMU Sederajat	9	45%
2.	Diploma	1	5 %
3.	S1	8	40%
4.	S2	2	10 %
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2011*

Jika dilihat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Natuna, Hampir berimbang, namun masih banyak diantara mereka 9 orang tamatan SMA, kemudian ada satu orang diantara mereka tamatan Diploma dan 10 sarjana hanya berbeda satu orang dari pendidikan SMA. Dengan kapasitas pendidikan yang mereka miliki maka mereka tidak akan maksimal dalam menjalankan tugas mereka. Anggota DPRD dipilih bukan berdasarkan atas kemampaun mereka, tetapi berdasarkan atas hutang budi yang mereka tebarkan kepada masyarakat berupa uang beberapa rupiah dan sembako pada beberapa saat sebelum Pemilihan.

Mengenai latar belakang konsentrasi pendidikan tentunya memiliki pengaruh juga terhadap keilmuan baik itu perpolitikan dan dalam pemutusan

permasalahan yang ada tentunya membutuhkan pengetahuan tertentu namun tidak kemungkinan hal ini bisa di pelajari namun membutuhkan waktu yang tidak sedikit, hal ini bisa saja dalam setiap keputusan yang diambil oleh mereka yang tidak mempunyai keilmuan dalam tugas mereka mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan partai buhan berdasarkan pengetahuan sendiri.

Selain itu Minimnya pengalaman ilmu organisasi yang dimiliki oleh para anggota, khususnya dibidang administrasi birokrasi pemerintahan. Oleh karenanya dalam melakukan evaluasi dan rekapitulasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Kepala Daerah menjelang berakhirnya tahun anggaran belum jeli dan kurang cermat.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **VI. 1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) anggaran tahun 2010, maka peneliti menarik kesimpulan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yang dibahas pada Bab awal untuk itu peneliti merumuskan sebagai berikut:

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) anggaran tahun 2010 *kurang baik*, sesuai dengan hasil rekapitulasi keseluruhan Questioner pada tabel V.15 hal 92, yaitu sebanyak 64,3%. Dikatakan kurang baik karena dalam pelaksanaan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) anggaran tahun 2010, Fungsi pengawasan anggaran dikategorikan belum mampu dijalankan karena, laporan setiap tahunnya kurang jelas dan banyak terjadi penyimpangan, adanya lobi-lobi pribadi dari berbagai pihak terhadap kebijakan yang diputuskan DPRD, ada pelaporan realisasi berbeda dengan hal yang terjadi dilapangan, anggaran setiap tahunnya tidak sesuai dengan pembangunan yang ada, baik dari segi fisik maupun mental, terjadinya penyalahgunaan anggaran oleh SKPD, adanya PERDA, Peraturan Bupati dan kebijakan Bupati yang tidak berjalan dengan baik.. Hal ini sesuai dengan hipotesa yang telah peneliti jelaskan sebelumnya bahwa Fungsi Pengawasan Anggaran Oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna belum berjalan dengan baik. Karena tidak sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 yang meliputi tahap Perencanaan Pengawasan Anggaran, Tahapan Pelaksanaan Pengawasan Anggaran, Tahap Pertanggung Jawaban.

## **V.2 Saran**

1. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai DPRD khususnya didalam melaksanakan pengawasan APBD harus selalu berusaha membuat perencanaan pengawasan yang matang pada setiap tahunnya dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, lakukan perencanaan pengawasan yang telah ada sesuai dengan prosedur serta DPRD Kabupaten Natuna agar menyadari Tugas dan fungsinya dilegislatif untuk rakyat. Harus adanya rasa tanggungjawab terhadap pembangunan yang ada di Natuna.
2. Saat melaksanakan pengawasan dan pertanggung jawaban oleh pemerintah daerah perlu adanya sikap kejujuran dan rasa tanggungjawab yang tinggi karna jika adanya kesalahan yang terjadi maka akan sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat Natuna selama tahun Anggaran yang berlaku.
3. DPRD dalam membuat keputusan pengesahan anggaran, pengesahan proyek, serta semua kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan Anggaran haruslah selalu berhati-hati terhadap penyalahgunaan wewenang terutama mereka yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang anggaran, serta pengawasan harus menghindari hal-hal yang berbentuk lobi-lobi

pribadi yang mengakibatkan hilangnya kepentingan masyarakat didalam apa-apa yang distujui sehingga menjadi kepentingan pribadi dan golongan tertentu maka kebijakan yang salah seperti ini akan merusak proses pembangunan dalam jangka anggaran yang berlaku di Kabupaten Natuna, bisa merusak sistim pemerintahan bahkan merusak pandangan masyarakat terhadap DPRD sebagai wakil mereka dilegislatif.

4. Menjadikan UU No 32 Tahun 2004 yang meliputi tahap Perencanaan Pengawasan Anggaran, Tahapan Pelaksanaan Pengawasan Anggaran, Tahap Pertanggung Jawaban sebagai pedoman dalam mewujudkan pengawasan anggaran yang efektif.
5. Selalulah senantiasa berpegang teguh terhadap tuntunan Agama didalam membuat kebijakan , dan ingat terhadap pesan Nabi Muhammad SAW selalulah berpegang teguh kepada AL-Quran dan Hadist serta selalu memperdalam ilmu agama pada setiap individu Anggota DPRD agar dalam menjalankan tugasnya selalu dalam keadaan yang benar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah. 1997. *Mekanisme pengawasan APBD dikabupaten sleman*. Tesis S2, MAP. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Anthony, Govindarajan. 2003. *Sistem pengendalian manajmen*, salemba empat, Jakarta.
- Halim a, Achmad tjahjono dan Muh. Fakir Hesein. 2000. *sistem pengendalian manajmen*. Edisi revisi . UUP AMP YKPN , Yogyakarta.
- Halim . A . 2001. *Bunga Rampai Manajmen keuangan daerah*. UUP AMP YKPN , Yogyakarta.
- Eschborn Norbert. 2004. *Akuntabilitas publik dan fungsi pengawasan DPRD*. Sekretariat Nasional EDEKSI, Jakarta Indonesia.
- Hehanusa, Maria., 2010. *kinerja partisipasi penganggaran terhadap kinerja aparat: integrasi variabel intervening dan variabel moderating pada pemerintah kota Ambon dan Pemerintah Kota Semarang*, Tesis S2, dipublikasikan, program Magister akuntansi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi; Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 3(2). 2001, Hal 441-456.
- Republik Indonesia. 2004. *Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. *Keputusan MENDAGRI R.I No. 4 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*. 2005. Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*. 2005. Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta.



*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*. 2005. Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta.

*Undang-undang Otonomi Daerah*. 2004. Fokus Media, Bandung.

*Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 1999 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran*. 2001. Citra Umbara, Bandung.

Ketetapan MRP Nomor XV/MPR/1998 tentang tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa UndangUndang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP).

Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001. Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pramono, Agus H. 2002. *Pengawasan Legislative terhadap Eksekutif dalam*

*Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang.

Rosseptalia, Rima. 2008. *pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel moderator partisipasi masyarakat dan transparansi*, skripsi dipublikasikan, program S1, Universitas Islam Indonesia.

Sopannah, dan Mardiasmo. 2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*, Simposium Nasional Akuntansi VI, Semarang, Hal 1160-1173.

Yudono, Bambang. 2002 *Optimalisasi peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah*. <http://www.bangda.depdagri.go.id./jurnal/jendela3.htm>.

Zainuddin etal . 2002. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia* . Pustaka pelajar, Yogyakarta.

Rasyid, ryaas M. 2001. *panduan parlemen daerah: kebijakan otonomi daerah dan peran DPRD*. Yayasan API, Jakarta.

Fattah, Nanang DR. 1997. Landasan Manajemen Pendidikan. PT. Remaja Rosdakarya bandung, bandung.

Septianto safar. 2011. tipe-tipe pengawasan <http://safarseptianto91.blogspot.com/2011/01/tipe-tipe-pengawasan.html>. 11 januari 2011

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang.

PERDA Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010.

PERDA No. 12 tahun 2010 tentang APBD kabupaten natuna tahun anggaran 2010.